

-DOKUMEN- *FINAL REPORT*

STRATEGI PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT



BAPPEDA

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

PROVINSI JAMBI

2019

Executive Summary

Sektor perikanan merupakan sektor yang bergerak dengan memanfaatkan sumberdaya alam lingkungan khususnya perikanan dan kelautan. Dalam sektor perikanan terdapat paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat dalam pengembangan pengelolaan. Paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu suatu sistem paradigma dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya di tangan masyarakat. Paradigma ini bersifat terbuka, dimana masyarakat sendiri yang menyampaikan tujuan, kebutuhan dan aspirasinya, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan kata lain, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam khususnya perikanan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dapat dikembangkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Dihidupkannya kembali atau merevitalisasi kegiatan berbasis masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Sehingga kegiatan tersebut mampu mendorong terciptanya pencapaian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diharapkan.
2. Menciptakan praktek secara turun temurun mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat.
3. Pemberian tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya perikanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya, paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat terlihat sebagai kewenangan masyarakat untuk sumberdaya produktif, keberlanjutan dan berkeadilan. Hal ini tidak terpisahkan oleh evolutionary, participatory, locale-specific, kebudayaan sosial, ekonomi,

politik, serta lingkungan yang menyangkut seluruh masyarakat. Keunggulan dari paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yaitu menciptakan kesesuaian antara aspirasi dan budaya lokal, dimana paradigma tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat lokal, sehingga pelaksanaan pengelolaan dapat optimal. Terdapat beberapa kondisi kunci untuk keberhasilan paradigma kelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, antara lain :

- Aturan pengelolaan dijalankan secara efektif.
- Batas-batas wilayah secara fisik harus jelas.
- Pengakuan secara yuridis mengenai organisasi yang telah dibentuk.
- Sistem keanggotaan yang didefinisikan secara jelas.
- Terdapat desentralisasi dan pendelegasian wewenang.
- Terdapat kohesi kelompok dan fisibilitas ekonomi.
- Partisipasi anggota komunitas yang tinggi, sehingga sebagian besar atau bahkan seluruh anggota komunitas mempunyai akses untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan.
- Adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat

Penetapan strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat dengan Strategi **Strenghts-Threats (ST)**, menggunakan pendekatan factor Internal dan eksternal yang berada dalam lingkup perikanan dengan melihat Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga dokumen Analisis Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai rencana dan terlaksana sebagaimana jadwal kegiatan.

Kegiatan ini bersumber dari biaya pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Penyusunan Dokumen strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan agar kebijakan yang strategis dalam pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sumber-sumber ekonomi perikanan itu sendiri. Sangat besar harapan, hasil dokumen analisis ini dapat pula menjadi langkah kedepan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya pembangunan dapat lebih efisien dan terfokus.

Tim analisis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dan berpartisipasi baik mulai saat penyusunan proposal, pengambilan data hingga dengan penyusunan dokumen "***Final Report***" ini.

Akhirnya semoga hasil ini bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan kita semua senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah SWT untuk dapat mengemban tugas dan amanat dalam melaksanakannya

Jambi, November 2019

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	8
1.3. Manfaat	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Produk Domestik regional Bruto (PDRB)	10
2.2. Pengertian Perikanan	11
2.3. Beberapa Pengertian Dalam Bidang Perikanan	12
2.4. Pembangunan Perikanan Berkelanjutan	12
2.5. Teori Berbasis Ekonomi, Sektor dan Komoditi Unggulan	18
2.6. Analisis Location Quotient (LQ)	22
2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)	23
2.8. Analisis SWOT	29
2.9. Pengertian Agribisnis	30
2.10. Kerangka Pikir	37
III. METODOLOGI	32
3.1. Tempat dan Waktu Kegiatan	32
3.2. Jenis dan Sumber Data	32
3.3. Metode, Teknis dan Model Analisis Data	33
3.3.1. Analisis Location Quotient (LQ)	33
3.3.2. Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology)	35
3.3.3. Analisis Spesialisasi (SI)	37
3.3.4. Metode Pengambilan Keputusan Komoditi (AHP)	38
3.3.5. Analisis SWOT	43
3.4. Kerangka Teoritis/Pemikiran	49

IV. STATEGI PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT	50
4.1. Geografi dan demografi Provinsi Jambi	50
4.1.1. Kondisi geografis Provinsi Jambi.....	50
4.1.2. Kependudukan	52
4.2. Analisis Ekonomi dan Basis Perikanan	57
4.3. Analisis Penentuan Faktor-faktor komoditas sasaran secara berkelanjutan	65
4.4. Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat	68
V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018.....	5
2. Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018.....	7
3. Matriks Perbandingan Berpasangan	28
4. Tabel Skala Saaty.....	28
5. Matriks SWOT.....	30
6. Matrik Kegiatan	32
7. Tabel Nilai Ratio Inconsistency (RI)	43
8. Tabel IFA / EFA.....	48
9. Luas Wilayah Dalam Provinsi Jambi	50
10. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2010-2018.....	53
11. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Provinsi Jambi Menurut Sektor yang diusahakan, Jenis Usaha Utama dan Sumber penghasilan Utama Tahun 2018	55
12. Produksi Perikanan Tahun 2018 (Ton).....	58
13. Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Ikan (Ton)	60
14. Perkembangan Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Jenisnya di Perairan Umum	61
15. LQ Produksi Perikanan, Jenis Perairan, Kabupaten/Kota.....	64
16. LQ Perairan Darat, Budidaya Ikan Kolam, Keramba, Sawah dan Tambak.....	64
17. Bobot Antar Kriteria	66
18. Nilai Eigen Kriteria.....	66
19. Eigen Value Alternatif, Bobot dan Ranking Jenis Perikanan .	67
20. Bobot dan Rating Untuk Faktor Internal.....	69
21. Bobot dan Rating Untuk Faktor Eksternal.....	70

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2014-2018.	6
Gambar.2.	Grafik Persentase Distribusi Sektor Pembentuk PDRB Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2018	6
Gambar 3.	Struktur Hirarki yang Complete.....	26
Gambar 4.	Struktur Hirarki yang Incomplete	27
Gambar 5.	Tipologi Klassen	36
Gambar 6.	Grafik Analisis SWOT	46
Gambar.7.	Kerangka Teoritis/Pemikiran	49
Gambar.8.	Persentase Pembagian Wilayah Provinsi Jambi	51
Gambar.9.	Grafik Rata-rata Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2014-2018.....	54
Gambar.10.	Distribusi RTUP Sektor Pertanian Tahun 2018.....	54
Gambar.11.	Rata-rata Jumlah RTUP Perikanan Laut Tahun 2010-2018.....	56
Gambar.12.	Rata-rata Produksi Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010-2018	57
Gambar.13.	Grafik Pertumbuhan Alat Tangkap Perairan Umum Berdasarkan Wilayah Tahun 2014-2018	62
Gambar.14.	Grafik Rata-rata Alat Tangkap Perairan Umum Berdasarkan Wilayah Tahun 2014-2018	63
Gambar.15.	Bagan Kombinasi Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat.	70
Gambar.16.	Kuadran Analisa SWOT	72
Gambar.17.	Diagram Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat	75

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

1. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Provinsi Jambi.
2. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Merangin
3. Produksi Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010-2018 (Ton)
4. Perkembangan Jumlah Alat Tangkap Perairan Umum
5. LQ Produksi Perairan dan Budidaya
6. Perikanan Budidaya
7. Beberapa Jenis Ikan Budidaya Provinsi Jambi

BAB. I

PENDAHULUAN

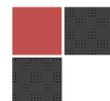
1.1. Latar Belakang.

Peningkatan jumlah penduduk akan diiringi dengan meningkatnya segala aspek, termasuk konsumsi suatu produk termasuk produk perikanan. Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat berakibat pada meningkatnya aktivitas penangkapan ikan di laut. Beberapa wilayah perairan bahkan telah mengalami penangkapan berlebihan.

Provinsi Jambi dalam menurut data BPS 2019 dalam kelompok komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp.53.555 atau sebesar 5,09 persen dari Rp.1.052.422,- untuk pengeluaran per kapita sebulan di tahun 2018 (BPS.2019). Hal ini menunjukkan kebutuhan dalam komoditas perikanan tersebut cukup besar. Semakin lama, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan menyebabkan adanya tuntutan pendayagunaan sumberdaya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kondisi ini cenderung memicu terjadinya pengelolaan sumberdaya secara eksploitatif dan pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan alam.

Pemanfaatan sumberdaya harus mempertimbangkan teknologi yang digunakan dan kemampuan daya dukung lingkungan atau pelestarian. Desakan ekonomi menjadi sangat dominan mempengaruhi perilaku masyarakat pesisir maupun sepanjang sumber aliran mata air/sungai dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Permasalahan ini apabila tidak diatasi, kehancuran ekosistem sumberdaya perikanan laut dan sungai akan terus terjadi yang intensitasnya semakin besar.

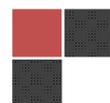
Sumber Daya Perikanan, khususnya sumber daya perikanan yang bersifat "*open access*" yang dapat dimanfaatkan/dikelola masyarakat umum karena sifatnya "*public proverty*" harus dikelola dengan baik dan



lestari. Oleh karena itu dalam pengelolaanya harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan demi generasi yang akan datang. Menurut *World Convention Economic Development/WCED* (1987), bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik yang dikenal dengan "*Sustainable Development*", yaitu prinsip pembangunan yang berkelanjutan yaitu adanya keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan aspek kelestarian ekosistem perairan tersebut, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar serta sosial diterima oleh norma masyarakat setempat.

Pada saat ini, pemanfaatan sumberdaya ikan merupakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan pasar (*market-driven*). Sebagai konsekuensinya telah terjadi peningkatan upaya penangkapan ikan (baik jumlah armada maupun jenis alat tangkap) dan mendorong eksploitasi sumberdaya ikan secara intensif. Dampaknya pada tahun 1990-an, kemampuan memperbaharui diri sumberdaya ikan tidak dapat lagi mengimbangi tingginya laju eksploitasi. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penurunan sejumlah stok ikan tetapi juga menimbulkan krisis ekologi, ekonomi dan sosial di wilayah utama perikanan khususnya daerah pantai, seperti pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa dan Bali (Nikijuluw 2002).

Pembangunan perikanan tangkap ke depan dinilai cerah karena potensi dan prospek yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu : (1) luasnya perairan yang dimiliki (laut teritorial, laut nusantara dan ZEE), dan perairan umum (danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya); (2) Potensi lestari ikan laut yang belum dikelola secara optimal; (3) Potensi sumberdaya manusia nelayan yang melimpah yang belum dioptimalkan; (4) Prospek pasar dalam dan luar yang cerah untuk produk-produk perikanan laut; (5) Permintaan ikan untuk konsumsi dalam dan luar negeri sangat tinggi seiring meningkatnya jumlah penduduk; dan (6) Kesadaran masyarakat



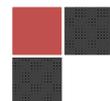
akan pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang aman, sehat dan bebas kolesterol sehingga masyarakat beralih dari mengkonsumsi *red-meat* menjadi *white meat* (Dirjen Perikanan Tangkap, 2004).

Sumberdaya perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih (*Renewable Resources*) sepanjang dalam pengelolaannya menerapkan prinsip ramah lingkungan yaitu tidak dicemari badan air baik oleh aktifitas perikanan (budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan) atau aktifitas diluar perikanan seperti membuang limbah ke badan air, penggunaan pestisida sektor pertanian yang mengalir ke perairan umum, tumpahan minyak, eksploitasi seputar aliran sungai yang menyebabkan kekeruhan pada perairan umum dll. Aktifitas ini tidak hanya membahayakan organisme dan tumbuhan perairan, tetapi juga dapat membahayakan manusia.

Saat ini masih sering ditemui aktivitas menangkap ikan dengan jalan pintas yang dapat merusak lingkungan dan bahkan dapat membahayakan jiwa manusia seperti: penangkapan ikan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak, alat tangkap yang tidak selektif sehingga akan menangkap ikan dari yang sangat kecil sampai ikan besar bahkan induk ikan. Sedangkan cemaran perairan diluar aktifitas perikanan sangat masif yang hanya mementingkan ekonomi semata dan memandang sebelah mata terhadap dampak negatif yang dialami ekosistem perairan.

Peningkatan jumlah nelayan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Rumah tangga/perusahaan Perikanan Laut menggunakan motor berpotensi memunculkan berbagai konflik dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya ikan, terkait isu teknologi, nelayan kecil sering kali kalah bersaing dengan nelayan modern.

Perikanan tangkap nasional masih dicirikan oleh perikanan tangkap skala kecil.Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan perikanan tangkap

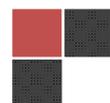


di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu sekitar 85% (Hermawan,2006)

Perikanan tangkap skala kecil menurut UUNo.45/2009 adalah orang yang mata Pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima gross ton (GT).

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II-2019 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 27,41 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan untuk Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 44,00 persen. (BPS. Prov. Jambi) 1)

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Pada Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 57,45 Triliun rupiah atau sebesar 27,57 persen. Sub kategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 87,58 persen adapun distribusi persentasi PDRB Provinsi Jambi menurut Atas Harga Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 disajikan seperti dalam tabel berikut;



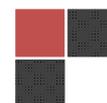
Tabel 1 : Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018.

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,22	28,24	30,05	29,68	27,57	28,35
B	Pertambangan dan Penggalian	24,48	19,01	16,64	17,77	20,17	19,61
C	Industri Pengolahan	10,94	11,05	10,54	10,34	9,97	10,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	7,10	7,23	7,05	7,01	7,07	7,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	11,12	11,84	11,2	11,77	11,14
H	Transportasi dan Pergudangan	2,95	3,17	3,36	3,28	3,19	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,15	1,19	1,21	1,19	1,17
J	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,47	3,65	3,74	3,79	3,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	2,43	2,53	2,46	2,32	2,44
L	Real Estat	1,45	1,56	1,59	1,56	1,55	1,54
M,N	Jasa Perusahaan	1,09	1,16	1,21	1,21	1,19	1,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,88	4,72	4,51	4,60	4,57
P	Jasa Pendidikan	3,12	3,30	3,35	3,32	3,35	3,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,10	1,10	1,11	1,08
R,S,-T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,96	0,97	0,97	0,96	0,95
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

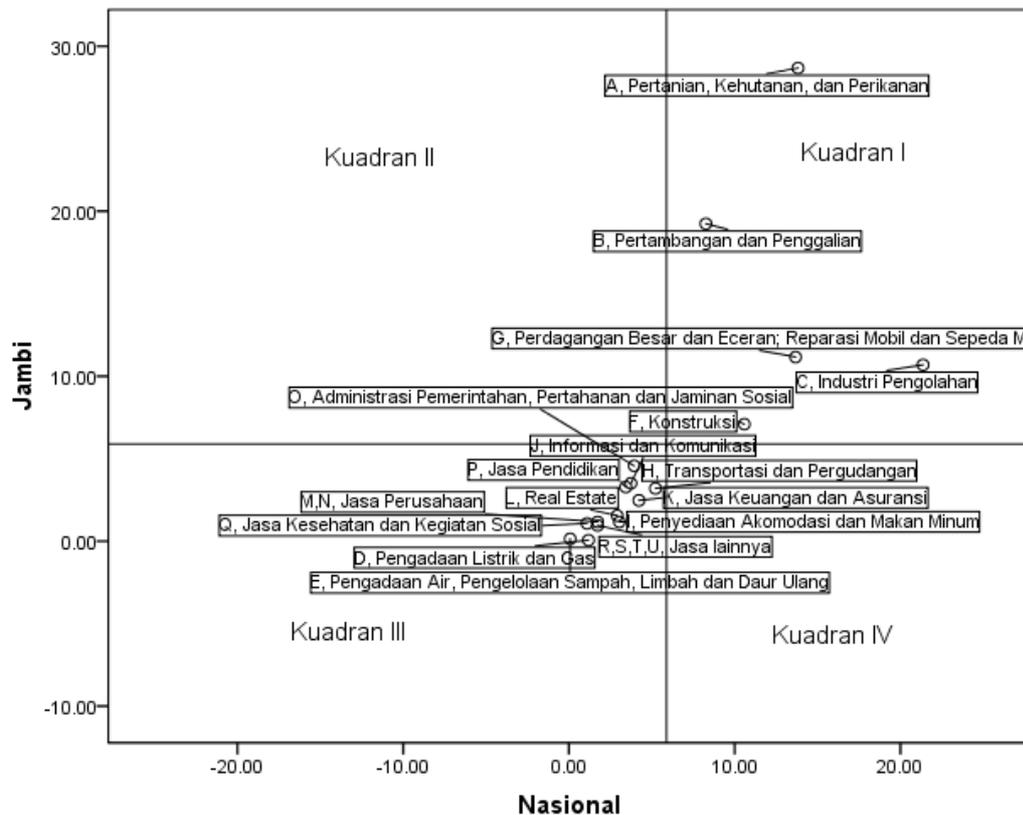
Sumber : BPS Provinsi Jambi (2018)

Ket: **) angka sementara

Terlihat dari tabel di atas, pembangunan perekonomian Provinsi Jambi berkaitan erat dengan pembangunan sektor pertanian, kehutanan, dan Perikanan, hal ini dapat dilihat PDRB Atas Dasa Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, PDRB Provinsi Jambi Tahun 2014-2018, jenis lapangan usaha ; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki rata-rata distribusi terbesar dalam mendukung perekonomian yakni 28,35 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,26 % namun lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan daerah yakni sebesar 1,40%. Kenyataan tersebut dapat diartikan bahwa lapangan usaha ini masih merupakan sektor



strategi dalam peningkatan pendapatan perekonomian daerah dalam Provinsi Jambi.

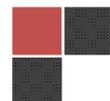


Gambar 1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2014-2018.

Sumber : BPS. (Data diolah)

Untuk sektor pada PDRB Atas Harga Berlaku Provinsi Jambi Tahun 2014-2018, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada Kabupaten Muaro Jambi 14,53 persen, Kabupaten Bungo 6,46 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6,22 persen. Sedangkan pertumbuhan yang terkecil untuk sektor yang sama adalah Batanghari yakni -3,95 persen.

Sebagaimana gambar di atas, disisi perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Provinsi



Jambi sebesar 28,6% melebihi pertumbuhan sektor yang sama yakni sebesar 13,2% yang diikuti sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

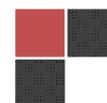
Tabel 2. Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

Sektor PDRB	2016	2017	2018	Pertumbuhan
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51.441,77	56.355,83	57.452,77	5,68%
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	45.214,38	49.784,92	50.314,28	5,49%
a. Tanaman Pangan	4.494,06	4.373,89	4.622,41	1,42%
b. Tanaman Hortikultura	6.343,66	6.647,15	7.028,87	5,26%
c. Tanaman Perkebunan	31.624,66	35.844,74	35.459,11	5,89%
d. Peternakan	2.279,69	2.408,28	2.661,26	8,05%
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	472,31	510,86	542,63	7,19%
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.266,48	2.295,90	2.403,43	2,98%
3. Perikanan	3.960,91	4.275,01	4.735,06	9,34%

Sumber. BPS.2019 (Data diolah)

Dari tabel di atas, pada Tahun 2018 sub sektor Perikanan menempati perkembangan kenaikan yang signifikan dalam kontribusi Pendapatan Daerah Regional Bruto sebesar 9,34 persen dari tahun 2016. Sehingga dapat juga dikatakan peningkatan pertumbuhan sub sektor ini akan berdampak kepada kegiatan sumberdaya perikanan.

Sumberdaya perikanan merupakan barang umum (good common) yang bersifat open access, artinya setiap orang berhak menangkap ikan dan mengeksploitasi sumberdaya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Hal ini mirip dengan "hukum rimba" dan "pasar bebas". Secara empiris, keadaan ini menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan tragedy of common baik berupa kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan maupun konflik antar orang yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, perlu diatur regulasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan



sumberdaya perikanan. Sumberdaya perikanan yang bersifat diperbaharui (renewable) ini menuntut adanya pengelolaan dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati (Fauzi, 2006).

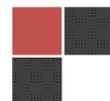
Memang ada teori yang mengatakan bahwa, ekosistem perairan mempunyai kemampuan untuk menetralsir ligkungannya, namun kemampuan memulihkan diri (*renewable resources*) tersebut memerlukan persyaratan yang cukup ketat seperti: praktek pengelolaan sumberdaya perairan dilakukan dengan cara ramah lingkungan, pembuangan limbah dan aktivitas tenurial masih dibawah atau pada batas ambang ekosistem perairan mampu menetralsir yang pada giliranya diharapkan sumber daya perikanan dapat lestari.

Untuk itulah dengan penyusunan dokumen “Strategi Pelestarian Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat” diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan sumber daya perairan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, bisa dirumuskan suatu permasalahan dalam perikanan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendukung perekonomian daerah dengan Suatu Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Provinsi Jambi yang berbasis masyarakat guna meningkatkan produksi, meningkatkan mutu, menstabilkan harga, ketersediaan sarana produksi, memperkuat jaringan pemasaran atau pasca panen dalam wilayah Provinsi Jambi serta perlu membuat suatu kebijakan kedepan dengan suatu analisis kesesuaian aktifitas budidaya pada setiap daerah atau setiap aktifitas budidaya itu sendiri.

1.2. Tujuan

Tujuan analisis ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi, potensi dan pemasalahan wilayah yang ada di Provinsi Jambi serta menganalisis bagaimana wilayah pembangunan dapat ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi secara teoritis



dan sesuai dengan permasalahan yang ada di kabupaten/kota tersebut.

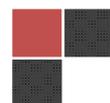
Secara ringkas tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasinya sumber daya perikanan berbasis masyarakat.
2. Mengetahui permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya perikanan.
3. Menyusun strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

1.3. Manfaat

Selain sebagai sarana dan proses studi analisis mengenai pembangunan wilayah, juga diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten/kota agar kebijaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan potensi wilayah.selain itu, akan mempermudah pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah pada Wilayah Pembangunan masing-masing yang bermuara pada pertumbuhan wilayah yang lebih merata di bawah kontrol pemerintah daerah.
2. Memberikan masukan tetang analisis pembangunan wilayah di daerah studi analisis, sehingga dapat dijadikan tambahan informasi dalam pembangunan regional dan juga sebagai referensi bagi analisis- analisis selanjutnya.



BAB. II

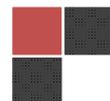
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Wilayah domestik suatu daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berada didalam batas-batas geografis daerah tersebut. Pada PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor diwilayah itu (Tarigan, 2005).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang

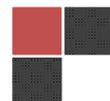


mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

2.2. Pengertian Perikanan.

Perikanan sesuai dengan definisi menurut UU No. 34/2001 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan UU No 45/2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati dan tujuan yang telah disepakati.

Berdasarkan definisi perikanan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa perikanan mencakup banyak aspek. Perikanan merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Tujuan dari sistem akan dapat tercapai, jika seluruh aspek yang ada dalam sstem dapat berfungsi dengan baik, dan secara terpadu mendukung untuk tercapainya tujuan.



2.3. Beberapa Pengertian Dalam Bidang Perikanan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Statistik Perikanan dibedakan atas data Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah.

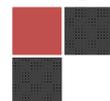
Rumah Tangga Perikanan Tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

2.4. Pembangunan Perikanan Berkelanjutan

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah berkelanjutan menjadi isu utama dalam melaksanakan pembangunan, yang kemudian dirumuskan kedalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan manusia.

Sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan terutama terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan habitatnya, perlu dilakukan upaya pelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya melalui pembentukan konservasi perairan. Bentuk kawasan konservasi perairan berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 adalah suaka perikanan (Pasal 7 ayat 1). Suaka perikanan didefinisikan sebagai



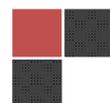
kawasan perairan tertentu dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Upaya konservasi atau perlindungan yang dilakukan adalah dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan dan habitatnya untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan dan habitatnya di wilayah perairan payau dan air tawar merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka menjaga dan melestarikan potensi sumberdaya ikan dan habitatnya untuk mengurangi tingkat tekanan dan kegiatan pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumberdaya ikan dan habitatnya. Oleh karena itu, kegiatan identifikasi pengembangan kawasan konservasi perairan payau dan air tawar sebagai langkah awal dalam pengembangan kawasan konservasi ini dilakukan.

Dengan demikian, pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya mencakup semua sektor pembangunan, termasuk didalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) mulai dijadikan agenda dunia pada tahun 1995 dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh FAO dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Selanjutnya, dilakukan perumusan definisi terkait dengan perikanan berkelanjutan, baik oleh lembaga-lembaga yang berkompeten maupun para ahli.

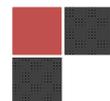
Sementara, salah satu ahli perikanan dunia, yaitu Hilborn (2005) dari University of Washington, menyatakan bahwa definisi perikanan



berkelanjutan adalah: aktivitas perikanan yang dapat mempertahankan keberlangsungan hasil produksi dalam jangka panjang, menjaga keseimbangan ekosistem antar generasi, dan memelihara sistem biologi, sosial, dan ekonomi guna menjaga kesehatan ekosistem manusia dan ekosistem laut.

Dengan demikian, dalam melaksanakan pembangunan perikanan berkelanjutan tidak lepas dari memadukan tujuan dari tiga unsur utamanya, yakni dimensi ekonomi, ekologi dan sosial. Pertama, tujuan pembangunan perikanan secara ekonomis dianggap berkelanjutan, jika sektor perikanan tersebut mampu menghasilkan produk ikan secara berkesinambungan (*on continuing basis*), memberikan kesejahteraan finansial bagi para pelakunya, dan memberikan sumbangan devisa serta pajak yang signifikan bagi negara. Kedua, tujuan pembangunan perikanan dikatakan secara ekologis berkelanjutan, manakala basis ketersediaan Stok atau sumber daya ikannya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebihan, dan tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar. Dan Ketiga, tujuan pembangunan perikanan dianggap secara sosial berkelanjutan, apabila kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil; ada kesetaraan gender (*gender equity*), dan minim atau tidak ada konflik sosial. (Anonim.2014)

Nikijuluw (2002) dalam Biasane (2004) memberikan definisi tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat menyangkut pula pemberian tanggung

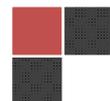


jawab kepada masyarakat, sehingga mereka mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut, kegiatan penangkapan merupakan ciri yang cukup menonjol pada umumnya, namun keberhasilan usaha penangkapan tersebut mengandung ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian ini disebabkan oleh ketersediaan dan potensi sumberdaya ikan yang memiliki variasi spasial dan temporal yang tinggi, terlebih apabila tingkat pemanfaatan telah melampaui potensi lestarnya sehingga bukan saja hasil tangkapan akan semakin menurun, tetapi juga menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya ikan (*overexploited*). Akibatnya keberhasilan usaha penangkapan bersifat sangat riskan dibanding usaha perikanan lainnya, utamanya budidaya perikanan. Usaha budidaya perikanan dapat berfungsi nyata dalam penyediaan produk perikanan secara kontinyu dan terencana serta pengurangan tekanan eksploitasi terhadap jenis-jenis biota hayati yang dapat dibudidayakan.

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat merupakan bagian inti dari co-management. Korten (dikutip oleh Pomeroy, 1998) menjelaskan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat terdiri dari beberapa bagian, yaitu kumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama, mekanisme untuk pengelolaan yang efektif dan adil untuk mengatasi konflik, pengelolaan dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat atas sumber produktif, system local atau mekanisme penangkapan dan penggunaan sumberdaya yang tersedia, distribusi yang luas dalam partisipasi untuk mengontrol sumber dalam suatu masyarakat, dan kemampuan dalam pengelolaan.

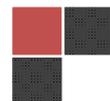
Sajise (1995) dalam Pomeroy (1998) telah mendefinisikan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat sebagai suatu proses di mana orang-orang diberikan kesempatan dan atau tanggung



jawab untuk mengelola sumberdaya mereka sendiri, dan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Lebih jauh Sajise menjelaskan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada kemampuan suatu masyarakat, tanggung jawab terkait untuk mengelola sumberdaya. Hal ini tidak terpisahkan *evolutionary*, *participatory* dan *locale-specific* dan mempertimbangkan faktor teknik, kebudayaan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang menyangkut seluruh masyarakat. Pada dasarnya, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat terlihat sebagai kewenangan masyarakat untuk sumberdaya produktif, keberlanjutan dan keadilan.

Ada 11 kondisi kunci untuk keberhasilan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (Pomeroy dan Williams, 1994 dalam Saad, 2010), yaitu:

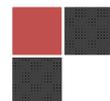
1. Batas-batas wilayah secara fisik harus jelas.
2. Keanggotaan didefinisikan secara jelas.
3. Kohesi kelompok
4. Organisasi yang ada tidak asing bagi komunitas nelayan karena system yang dikembangkan berdasarkan pengalaman organisasi masyarakat tradisional mereka.
5. Fisibilitas ekonomi.
6. Partisipasi anggota komunitas sedemikian tingginya, sehingga sebagian besar atau bahkan seluruh anggota komunitas mempunyai akses untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan.
7. Aturan pengelolaan dijalankan secara efektif.
8. Secara yuridis organisasi mereka diakui.
9. Kerjasama dan kepemimpinan
10. Desentralisasi dan pendelegasian wewenang
11. Koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.



Pendekatan *Ecosystem Based Fisheries Management* (EBFM) untuk pengelolaan sumberdaya ikan mungkin merupakan salah satu metode alternatif untuk pengelolaan ekosistem sumberdaya ikan yang kompleks. *The Ecosystem Principles Advisory Panel* (EPAP), menyatakan bahwa EBFM mengemban sedikitnya 4 aspek utama (*USANational Marine Fisheries Service*, 1999 dalam Wiyono, 2006): (1) interaksi antara target spesies dengan predator, kompetitor dan spesies mangsa; (2) pengaruh musim dan cuaca terhadap biologi dan ekologi ikan; (3) interaksi antara ikan dan habitatnya; dan (4) pengaruh penangkapan ikan terhadap stok ikan dan habitatnya, khususnya bagaimana menangkap satu spesies yang mempunyai dampak terhadap spesies lain di dalam ekosistem. Bila dalam penjelasan EPAP tidak disebutkan secara langsung tentang bagaimana mengelola perilaku orang atau manusia sebagai komponen ekosistem di mana mereka hidup dan memanfaatkan sumberdaya, tetapi sesungguhnya unsur manusia telah masuk di dalamnya.

Di lain pihak, *the National Research Council of the USA* (NRC) dalam definisinya menyebutkan manusia sebagai komponen sekaligus pengguna dalam ekosistem secara langsung serta membedakan antara ekosistem dan pengguna ekosistem tersebut. Tujuan akhir lain dari EBFM adalah menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem. Sebagai alat monitoring ekosistem, EBFM kemudian dilengkapi dengan indikator ekologi untuk mengukur perubahan ekosistem yang dimaksud. Indikator-indikator ini diupayakan lebih berarti secara ekologi, mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

Berdasarkan hasil monitoring ini diharapkan perubahan ekosistem termasuk manusia yang ada di dalamnya mudah dijelaskan, sehingga adaan ekosistem secara keseluruhan akan diketahui dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya untuk mengatasi kerusakan yang ada. Perencanaan dan pengelolaan laut berbasis ekosistem sangat relevan untuk strategi pembangunan berkelanjutan karena akan dapat



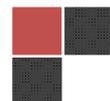
menjamin proses ekologi di laut, keanekaragaman biologi laut, dan kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli (Wiyono, 2006).

Implementasi dari perencanaan dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem harus dilakukan melalui proses perencanaan wilayah laut (regional marine planning). Untuk itu diperlukan partisipasi Pemda dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka integrasi perencanaan dan pengelolaan lintas provinsi. Pemerintah perlu mewujudkan pengaturan perencanaan dan pengelolaan laut yang mampu untuk mengakomodasi hal-hal, seperti penataan wilayah berbasis ekosistem laut skala luas, dan mendorong persiapan dan implementasi perencanaan wilayah laut (Wiyono, 2006).

2.5. Teori Berbasis Ekonomi, Sektor dan Komoditi Unggulan

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah ditentukan oleh besarnya kegiatan ekspor diwilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan basis dan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005). Ricardson (1991) menjelaskan bahwa Teori basis ekonomi merupakan model yang relatif sederhana. Teori ini menyederhanakan suatu perekonomian regional terbagi menjadi dua sektor, sektor pertama adalah sektor basis (sektor ekspor) dan sektor kedua adalah sektor bukan basis (sektor lokal). Model teori ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas dua sektor yaitu:

1. Sektor unggulan yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri, ini berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk



mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.

2. Sektor non unggulan yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.

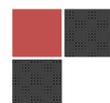
Sektor dan Komoditi Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Menurut Sambodo (2002) Sektor Unggulan merupakan sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulannya atau kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besarnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komoditas adalah : (1) Barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor; (2) Bahan Mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standard perdagangan Internasional (F. Rahardi, 2004). Komoditas dibagi menjadi komoditas industri, komoditas pertambangan, komoditas hasil hutan, komoditas hasil laut, komoditas kayu, komoditas hasil kerajinan rakyat.

Komoditas Unggulan adalah komoditi potensial yang dipanang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif, juga mmiliki efisiensi usaha yang

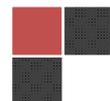


tinggi (Ely, 2014). Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria dari komoditas unggulan adalah :

1. Mempunya daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah).
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan.
3. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat.
4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia.
5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah (Depkimpraswil, 2003). Keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agribisnis. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud. Berikut adalah pengelompokan komoditas unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan posisi produk agro dari sisi teori keunggulan komoditas, antara lain :

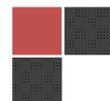
1. Komoditas unggulan komparatif : komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis. Atau pula, komoditas hasil olahan yang memiliki dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.



2. Komoditas unggulan kompetitif : komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.
3. Komoditas unggulan spesifik : komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.
4. Komoditas unggulan strategis : komoditas yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut:

1. Komoditas unggulan pasar ekspor : komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.
2. Komoditas unggulan pasar tradisional : komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.
3. Komoditas unggulan pasar modern : komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.

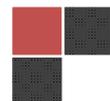


4. Komoditas unggulan pasar industri : komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur agro.
5. Komoditas unggulan pasar antar pulau : komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.
6. Komoditas unggulan pasar khusus : komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya. (Yuhana, 2008).

2.6. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode Location Quotient (LQ) bertujuan untuk mengidentifikasi suatu komoditas unggulan (Miller dan Wright.1991) dalam Darmawansyah(2003). dan metode Analisis komoditas yang ada pada suatu wilayah apakah termasuk ke dalam suatu basis atau non basis. Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan. begitu juga dengan metode LQ.

Kelebihan metode LQ dalam menganalisis komoditas unggulan yaitu penerapannya yang sederhana. mudah. tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung serta dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend yang sedang berlangsung. Keterbatasan metode LQ antara lain diperlukan akurasi data untuk mendapatkan hasil yang valid. Selain itu pada saat deliniasi wilayah kajian untuk menetapkan bahasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas. metode ini tidak memiliki acuan yang jelas oleh karena itu data yang dijadikan sumber penelitian perlu diklarifikasi agar mendapatkan hasil yang akurat. Kelemahan lainnya, dalam menggunakan metode LQ perlu berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa, bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan



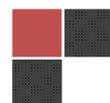
produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional dan tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi. Untuk menghindari bias musiman dan tahunan diperlukan nilai rata-rata data series yang cukup panjang, sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan data tidak kurang dari 5 (lima) tahun.

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP dikembangkan oleh Prof Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School di awal tahun 1970, yang sering digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu.

Analytic Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. *Resiprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersiat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adana $1/k$ kali penting dari A.
2. *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. *Depedence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*Complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).

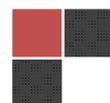


4. *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didarakan pada langkah-langkah berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di ranking.
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi, relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau *judgement* dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
5. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali.

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Rasio Konsistensi dirumuskan sebagai perbandingan indeks konsistensi (RI). Angka pembanding pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9, di mana:



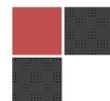
- a. Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya
- b. Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan kepentingan lainnya
- c. Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya
- d. Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih kuat dari kepentingan lainnya.
- e. Skala 2, 4, 6, 8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan.

Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam *Analytic Hierarchy Process*.

Prinsip dasar *Analytic Hierarchy Process* ;

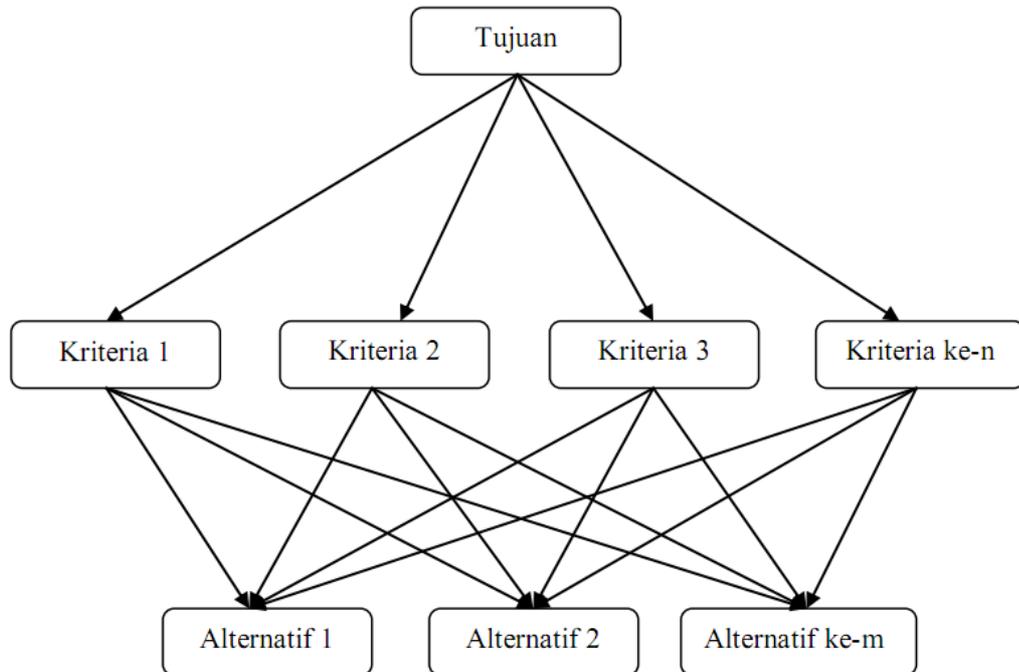
1. *Decomposition* ; Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur hirarki keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hirarki keputusan incomplete kebalikan dari hirarki yang complete yakni tidak semua unsur pada masing-masing jenjang mempunyai hubungan (gambar 3 dan 4). Pada umumnya problem nyata mempunyai karakteristik struktur yang incomplete. Bentuk struktur dekomposition yakni :

Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)

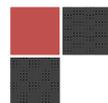


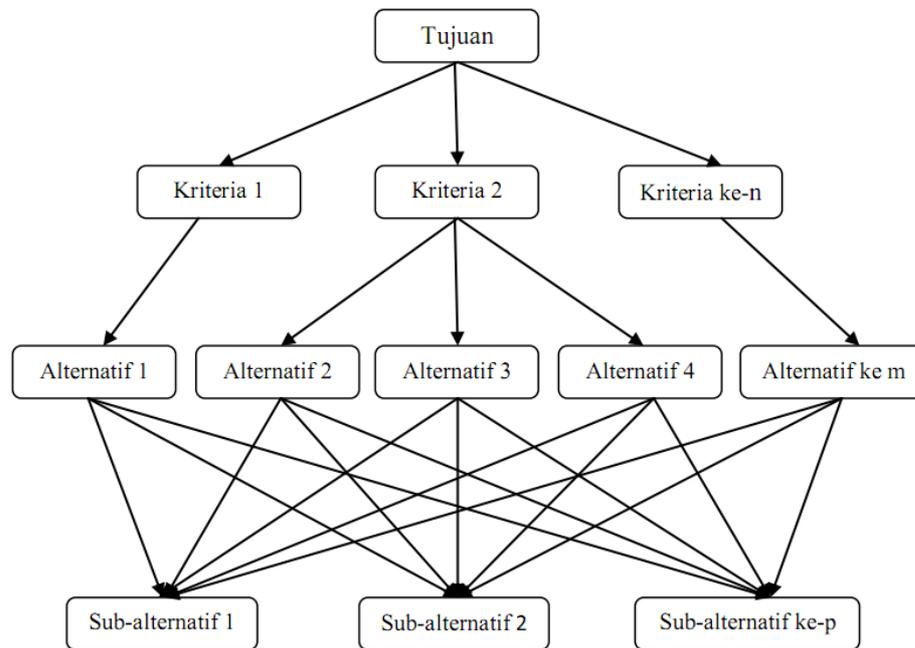
Tingkat kedua : Kriteria-kriteria

Tingkat ketiga : Alternatif-alternatif



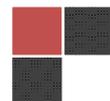
Gambar 3. Struktur Hirarki yang Complete.





Gambar.4. Struktur Hirarki yang Incomplete

2. *Decomposition Judgement.* dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya.
3. *Synthesis of Priority* ; dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur unsur pengambilan keputusan.
4. *Logical Consistency* merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.



Tabel . 3. Matriks Perbandingan Berpasangan

	A_1	A_2	...	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	A_{22}	...	a_{2n}
:	:	:	:	:
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

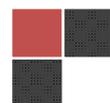
Nilai adalah nilai perbandingan elemen (baris) terhadap (kolom) yang menyatakan hubungan :

1. Seberapa jauh tingkat kepentingan A_1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A_1 (kolom) atau
2. Seberapa jauh dominasi A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) atau
3. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A_1 (baris) dibandingkan dengan A_1 (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel.4. Tabel Skala Saaty

Bobot	Kepentingan
1	Kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar (Equal)
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya (Moderate)
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya (Strong)
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek (Very Strong)
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan (Very strong)



2,4,6,8	Nilai -nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan
---------	--

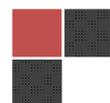
2.8. Analisis SWOT

Untuk menganalisis profil suatu operasional organisasi, persusahaan dan lainnya akan digunakan pendekatan yaitu analisis SWOT. SWOT singkatan dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), Threat (Tantangan). Analisis SWOT berisi evaluasi faktor internal perusahaan berupa kekuatan dan kelemahannya dan factor eksternal berupa peluang dan tantangan.

Menurut Rangkuti (2001), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Alat untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif stretegis seperti yang dijelaskan dalam Tabel berikut:



Tabel. 5. Matriks SWOT

<i>EFAS</i> \ <i>IFAS</i>	KEKUATAN (Strengths) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal	KELEMAHAN (Weakness) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal
PELUANG (Opportunities) Menentukan 1-10 faktor kekuatan internal	STRATEGI (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (Threats) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal	STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

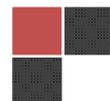
Sumber : Rangkuti, 2001

1. Faktor berupa kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

2. Faktor kelemahan

Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang



menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan

3 . **Faktor peluang**

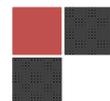
definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

4. **Faktor ancaman**

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untk masa sekarang maupun dimasa depan.

Berdasarkan Matriks SWOT di atas maka didapatkan 4 langkah strategi yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT Stretagi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti,2009).



BAB. III

METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu Kegiatan

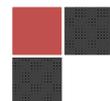
Penyusunan Dokumen Strategi Pelestarian Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Provinsi Jambi ini dilaksanakan dari Bulan Oktober-November 2019 dan bertempat dalam wilayah Provinsi Jambi dalam lingkup Kabupaten/Kota dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.6. Matrik Kegiatan

No	Item Kegiatan	Bulan							
		Oktober 2019				November 2019			
		Minggu Ke							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Desain Kegiatan								
2	Pengumpulan data, informasi dan literature								
3	Pengolahan Data Awal Analisis Tahap 1								
4	Penyusunan Laporan pendahuluan								
5	Presentasi Laporan Pendahuluan								
6	Survei								
7	Penyusunan Laporan Akhir								
8	Laporan Akhir								

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam analisis ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Biro Pusat Statistik dan instansi pemerintah lainnya, maupun kajian ilmiah yang bersifat referensi informasi dalam penulisan analisis ini (library research). Data sekunder utama berupa data *time series* dari Produk



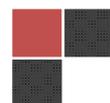
Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dari periode tahun 2014–2018 (lima tahun). Sedangkan data primer digunakan untuk analisa Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat.

3.3. Metode, Teknik dan Model Analisis Data

Metode analisis bersifat kualitatif dan kuantitatif. secara deskriptif menggunakan beberapa alat analisis yaitu: Menunjang Data Basis digunakan teknik Analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Analisis Indeks Spesialisasi (SI), untuk penentuan dan pengambilan keputusan digunakan Analisis Hierarchy Process (AHP) dan penetapan strategi menggunakan Analisis Matriks SWOT. Pengumpulan data sekunder maupun primer dilakukan dengan cara : wawancara dengan responden, *focus discussion group*, studi pustaka untuk mendapatkan referensi dan informasi pendukung analisis ini.

3.3.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan subsektor unggulan, ekonomi basis suatu wilayah dan komoditi basis wilayah. Penggunaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah yang berdasarkan potensinya. Kelebihan metode ini dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain adalah penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Kelemahannya adalah data yang digunakan harus akurat dan range yang lama. Hasil olahan LQ tidak banyak manfaat jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu data yang digunakan perlu diklarifikasi dahulu dengan beberapa sumber data lainnya sehingga mendapatkan konsistensi data yang akurat (Hendayana.2003). Dalam analisis ini digunakan data yang dikeluarkan instansi resmi pemerintahan yaitu Biro Pusat Statistik.



Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (area tanam atau area panen), dan produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor).

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan: jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Perbandingan relatif ini dinyatakan secara matematika rumus Location Quotient (LQ) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{pi/pt}{Pi/Pt}$$

Dimana :

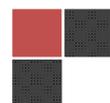
LQ = Location Quotient

pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat kabupaten/kota

pt = Produksi total komoditas pada tingkat kabupaten/kota

Pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat Provinsi Jambi

Pt = Produksi Total komoditas pada tingkat wilayah Provinsi Jambi



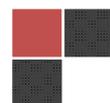
Dari hasil perhitungan analisis Location Quotient dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Jika $LQ > 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas “Basis”.
2. Jika $LQ = 1$; maka komoditas yang bersangkutan baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi memiliki tingkat spesialisasi atau dominan yang sama.
3. Jika $LQ < 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas “Non-Basis”.

3.3.2. Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology)

Alat analisis Tipologi Klassen merupakan gabungan atau perpaduan antara alat analisis hasil bagi lokasi atau Location Quotient (LQ) dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Komoditi, atau hal lain untuk perbandingan.

Menurut Klassen, alat analisis tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing – masing daerah. Analisis ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi sektor-sektor dalam perekonomian wilayah dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih tinggi (propinsi).



Tipologi Klassen juga merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor, subsektor, usaha/industri, atau komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah. Dalam analisis Klassen ini akan diperoleh informasi perbandingan antara kontribusi dan pertumbuhan sektor maupun subsektor ekonomi.

Tipologi kelas dalam analisis ini membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan produksi komoditi hortikultura Provinsi Jambi dalam suatu wilayah:

Laju pertumbuhan Produksi komoditi	Produksi Provinsi	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Prima (I)	Maju Tapi Tertekan (II)
$r_i < r$	Potensial (III)	Terbelakang (IV)

Gambar 5. Tipologi Klassen

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan subsektor pertanian i wilayah

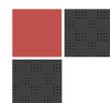
r : Laju pertumbuhan subsektor pertanian i daerah

y_i : Kontribusi sektor pertanian i wilayah

y : Kontribusi sektor pertanian i daerah

Ada empat tipologi yang menjelaskan posisi suatu sektor atau subsektor ekonomi dalam analisis Klassen, yaitu:

- Tipologi I (Sektor Prima): Sektor ini merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat, yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap produksi hortikultura yang lebih tinggi dibanding



tingkat pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada produksi hortikultura Propinsi. (*high growth and income*).

- b. Tipologi II (Sektor area Berkembang; Maju tapi tertekan; tertekan (*high income but low growth*)).
- c. Tipologi III: Sektor area potensial ; Berkembang dengan cepat; atau masih dapat berkembang dengan pesat (*high growth but low income*)
- d. Tipologi IV: Sektor area tertinggal; yang relatif tertinggal . (*low growth and low income*).

3.3.3. Analisis Spesialisasi (SI)

Analisis Spesialisasi (SI) berfungsi untuk melihat spesialisasi produksi hortikultura di Kabupaten/Kota terhadap jenis komoditi tertentu.

Analisis ini tergolong juga analisis ekonomi wilayah yang digunakan untuk mengkaji spesialisasi suatu wilayah dalam komoditas agribisnis menurut Baruwadi (2008:2).

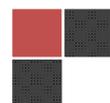
Koefisien spesialisasi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SI = \left(\frac{vi}{vt} - \frac{Vi}{Vt} \right) \times 100$$

- SI = Spesialisasi Indeks
 vi = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat kabupaten/kota *i*
 vt = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat kabupaten/kota *i*
 Vi = produksi total faktor analisis jenis *i* di tingkat Provinsi.
 Vt = produksi total faktor analisis jenis Provinsi Jambi

Kesimpulan :

- SI > 1 = Terjadinya spesialisasi analisis jenis *i* di kabupaten/kota *i* secara relatif dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi.
- SI < 1 = Tidak terjadinya spesialisasi analisis jenis *i* di Kabupaten/kota *i* dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi



3.3.4. Analytical Hierarchy Process (AHP)

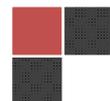
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School di awal tahun 1970, yang digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif. Dalam penentuan prioritas diperlukan uji konsistensi terhadap pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multi faktor dan mencakup berbagai jenjang maupun kepentingan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode Analytical Hierarchy Process ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami yaitu Decomposition, Comparative Judgement, Synthesis of Priority, Logical Consistency.

Analytical Hierarchy Process mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari Reciprocal Comparison, Homogeneity, Dependence dan Expectation.

PROSEDUR AHP

Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saaty, yaitu: Decomposition, Comparative Judgement, dan Logical Consistency. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Dekomposisi masalah;
- 2) Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen;
- 3) Penyusunan matriks dan Uji konsistensi;
- 4) Penetapan prioritas pada masing-masing hirarki;
- 5) Sintesis dari prioritas; dan
- 6) Pengambilan/penetapan keputusan.

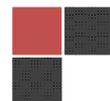


Dalam metode Analytical Hierarchy Process dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kadarsyah Suryadi dan Ali Ramdhani, 2010) :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahap ini penulis berusaha menentukan masalah yang akan penulis pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada penulis coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya penulis kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang penulis berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).

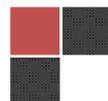


3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau



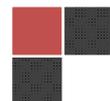
kriteria yang setingkat di atasnya. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5. 4.

4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)/2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di bawah.



Intensitas Kepentingan:

- a. 1 berarti kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar
 - b. 3 berarti elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
 - c. 5 berarti elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
 - d. 7 berarti satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
 - e. 9 berarti satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
 - f. 2,4,6,8 berarti nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.
 6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 7.
 7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh



normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Adapun yang diukur dalam Analytical Hierarchy Process adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %

Rumus Untuk Menentukan Rasio Konsistensi (CR) Indeks konsistensi dari matriks berordo n dapat diperoleh dengan rumus :

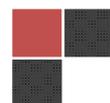
$$CI = \frac{\lambda_{maksimum} - n}{n - 1}$$

Dimana :

CI = Indek konsistensi (Consistency Index)

λ maksimum = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n

λ maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vektor utama. Apabila C.I = 0, berarti matriks konsisten. Batas ketidakkonsistenan yang ditetapkan Saaty diukur dengan menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai RI bergantung pada ordo matrik n .



Tabel .7. Tabel Nilai Ratio Inconsistency (RI)

N	RI
1	0,00
2	0,00
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49
11	1,51
12	1,58

CR dirumuskan :

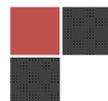
$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistensian pendapat masih dianggap dapat diterima.

Jika $CR > 0,10$ (10%) maka berarti ada ketidakkonsistenan saat menetapkan skala perbandingan sepasang kriteria, jika hal ini terjadi, dapat dipastikan bahwa solusi hasil metode AHP menjadi tidak berarti bagi pengguna.

3.3.5. Analisis SWOT

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan sistematis dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan yang akan dipilih. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities) serta minimalisasi kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) (Rangkuti, 2002).



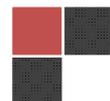
Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

Sebelum melakukan analisis, maka diperlukan tahap pengumpulan data yang terdiri atas tiga model yaitu :

a. Matrik Faktor Strategi Internal

Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel IFAS.

- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan).
- Beri rating masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar kecilnya pengaruh yang ada pada faktor strategi internal, mulai dari nilai 4 (sangat baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik) dan nilai 1 (tidak baik) terhadap kekuatan nilai “rating” terhadap kelemahan bersifat negatif, kebalikannya.
- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 1 pada kolom bobot (kolom 3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan.
- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk memperoleh skoring pada kolom 4.
- Jumlah skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya.



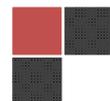
Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian di perbandingkan antara total skor kekuatan dan kelemahan.

b. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel EFAS.

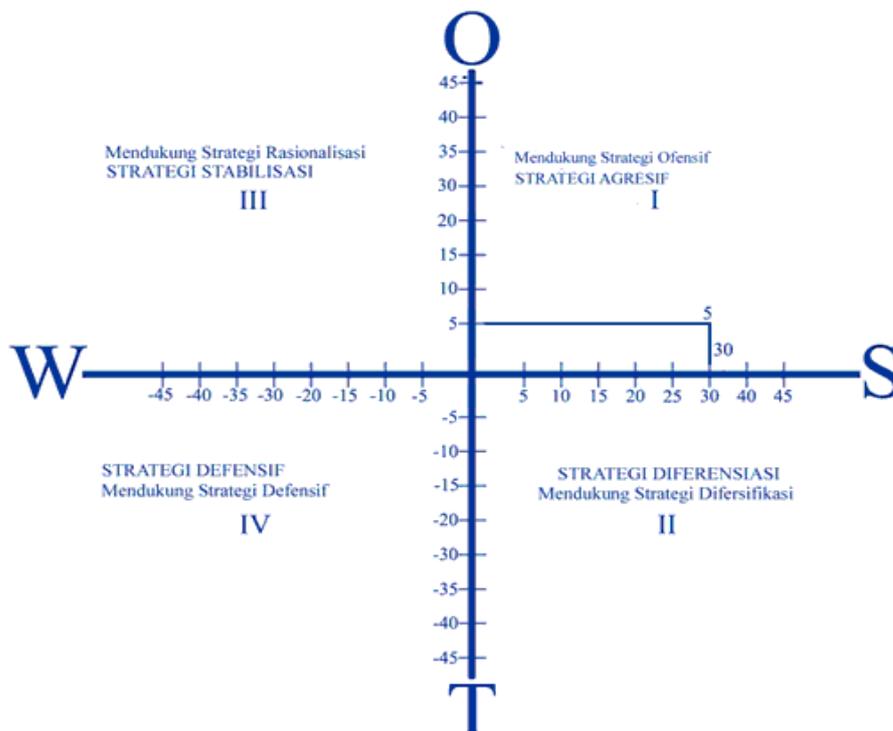
- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman). - Beri rating dalam masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar kecilnya pengaruh yang ada pada faktor strategi eksternal, mulai dari nilai 4 (sangat baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik) dan nilai 1 (tidak baik) terhadap kekuatan nilai “rating” terhadap kelemahan bersifat negatif, kebalikannya.
- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 1 pada kolom bobot (kolom 3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan.
- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk memperoleh skoring pada kolom 4.
- Jumlah skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya.

Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian di perbandingkan antara total skor kekuatan dan kelemahan.



c. Matriks Posisi

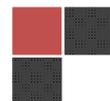
Hasil analisis pada tabel matriks faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal dipetakan pada matriks posisi dengan cara Sumbu horizontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman.



Gambar.6. Grafik Analisis SWOT

Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi

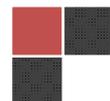


yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah- masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik (turn around).

Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Proses implementasi SWOT diawali dengan: (a) tahapan identifikasi data dan informasi sebagai bahan evaluasi faktor internal dan eksternal; (b) tahapan analisis melalui pemetaan faktor-faktor teridentifikasi dalam bentuk matrik SWOT; (c) tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pada tahapan (a) dan (b). Secara garis besar SWOT mengilustrasikan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mencapai tujuan, disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan antisipasinya seperti digambarkan pada Tabel berikut.

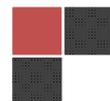


Tabel.8. IFA/EFA

<i>Internal</i> <i>Eksternal</i>	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakness)
PELUANG (Opportunities)	STRATEGI (SO) <i>Strategi ini dirumuskan dengan tujuan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.</i>	STRATEGI (WO) <i>Strategi ini dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.</i>
ANCAMAN (Threats)	STRATEGI (ST) <i>Strategi ini dirumuskan dengan tujuan menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman.</i>	STRATEGI (WT) <i>Strategi ini dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan dan menghindari/menghadapi ancaman.</i>

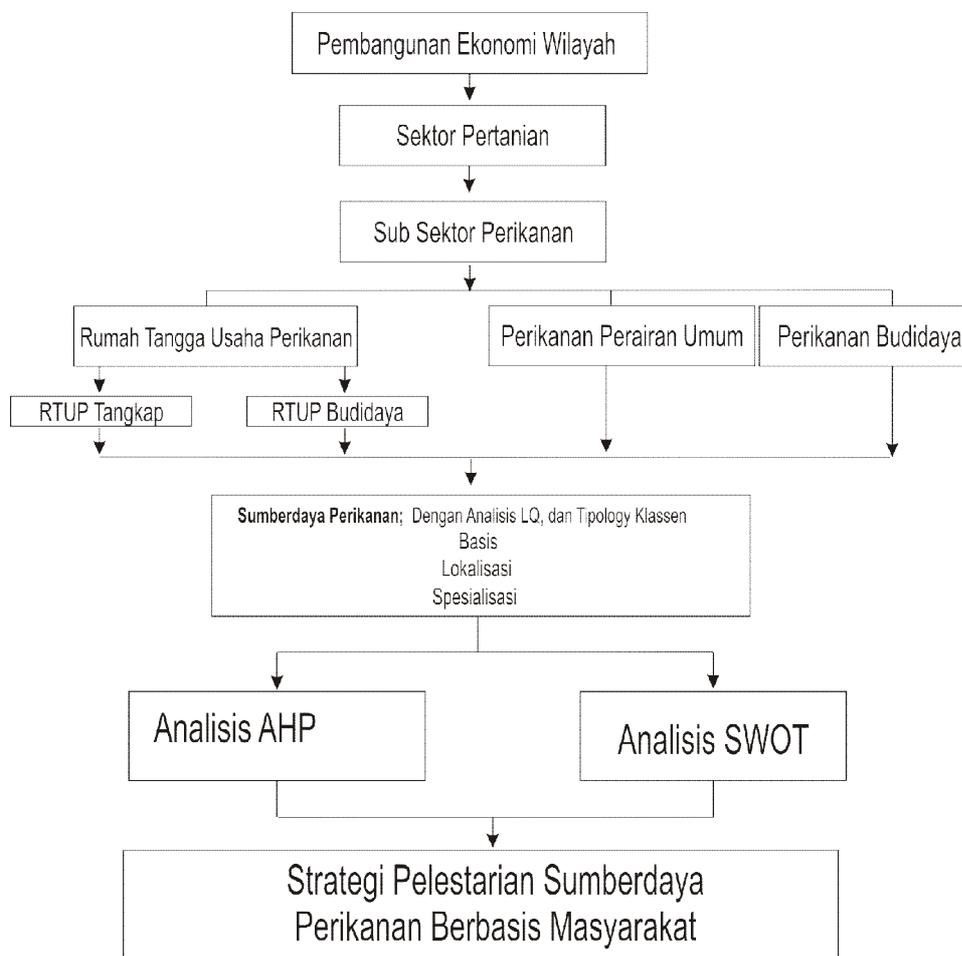
Sumber : Rangkuti 2002.

Penerapan Quantitative Strategic Planning (QSPM) diawali dengan menentukan faktor-faktor kunci dari suatu strategi melalui hasil analisis SWOT. Selanjutnya, masing-masing strategi diberikan pembobotan dan disajikan dalam bentuk matriks. Berdasarkan matriks tersebut, responden yaitu para *stakeholder* akan diminta untuk memberikan nilai numerik 1-5 mengikuti skala Likert, kemudian hasil pembobotan menurut faktor-dikalikan dengan hasil penilai panel ahli dan hasil akhir perkalian diurutkan; nilai tertinggi bobot akhir merepresentasikan prioritas pilihan strategi.

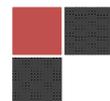


3.4. Kerangka Teoritis/Pemikiran

Untuk pendekatan masalah yang seperti diuraikan di atas, maka analisis strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Provinsi Jambi menggunakan suatu kerangka pikir teoritis dengan pendekatan produksi perikanan, jenis perairan umum tangkap dan budidaya dan sebagaimana bagan di bawah ini;



Gambar 6. Kerangka Teoritis Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat



BAB. IV

STRATEGI PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

4.1. Geografi dan demografi Provinsi Jambi

4.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota administratif dengan luas wilayah 53.435 Km², luas daratan 50.160,05 Km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km² terletak antara 00 55' BT°10' sampai 1040° 45' LS dan antara 1010° sampai 20 di antara jajaran bukit barisan yang memiliki keuntungan dalam potensi lahan dengan masing-masing luas sebagai berikut ;

Tabel.9. Luas Wilayah dalam Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persen (%)
1	Kerinci	3.355,27	6,69
2	Merangin	7.679,00	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	12,33
4	Batanghari	5.804,00	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,27
8	Tebo	6.461,00	12,88
9	Bungo	4.659,00	9,29
10	Kota Jambi	205,43	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	0,78
Total		50.160,05	100

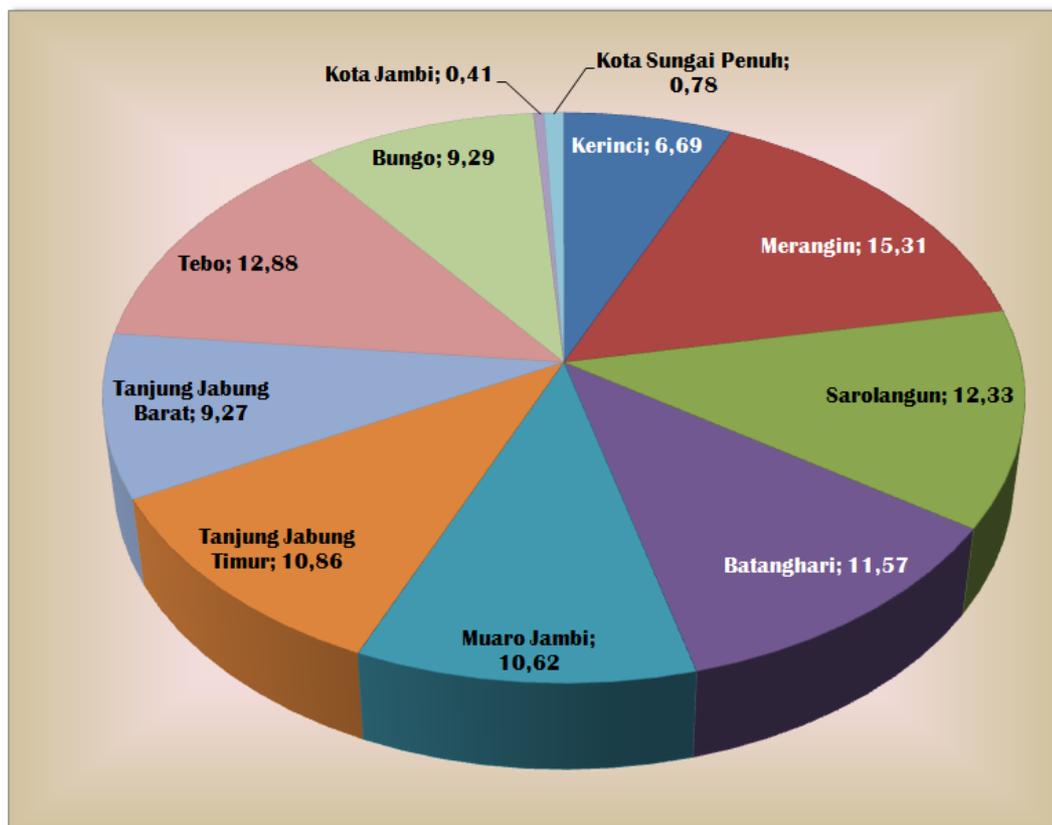
Sumber : BPS.2019

Topografi Provinsi Jambi bagian timur umumnya merupakan rawa-rawa wilayah barat pada umumnya tanah daratan (lahan kering) dengan topografi bervariasi dari datar, bergelombang sampai berbukit. Secara

spesifik daerah hulu merupakan bentangan pegunungan Bukit Barisan, sebagian diantaranya bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Jenis tanah secara umum didominasi oleh podsolik merah kuning (PMK) 44,56%. Jenis tanah lainnya adalah Latosol, termasuk Regosol (18,67%), Gley Humus (10,74%) sisanya organosol.

Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi beriklim tipe B berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson* dengan bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan 2-4 bulan. Rata-rata curah hujan adalah 179-279 mm pada bulan basah dan 68-106 mm pada bulan kering dengan ketinggian antara 3- 938 M diatas permukaan laut.

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada Tahun 2018 sebanyak 141 kecamatan dan 1.375 desa dan 187 kelurahan.



Gambar.8. Persentase pembagian Wilayah Provinsi Jambi.

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km².

Provinsi Jambi memiliki banyak sungai besar diantaranya; Sungai Batang Hari, Sungai Batang Asai, Sungai Bulian, Batang Tembesi, Batang Tebo, Sungai danau bangko, Sungai Serengam, Sungai Kahidupan kaor Sungai Singkati-gedang, Sungai Singoan, Sungai Pengabuan, Sungai Betara, Sungai Kumpe dan lainnya dan banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi provinsi Jambi.

4.1.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 sebanyak 3.570.272 jiwa, dimana pada tahun sebelumnya Tahun 2017 sebanyak 3.515.017 jiwa. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,57 persen dengan data jumlah penduduk sebagaimana tabel di bawah ini;

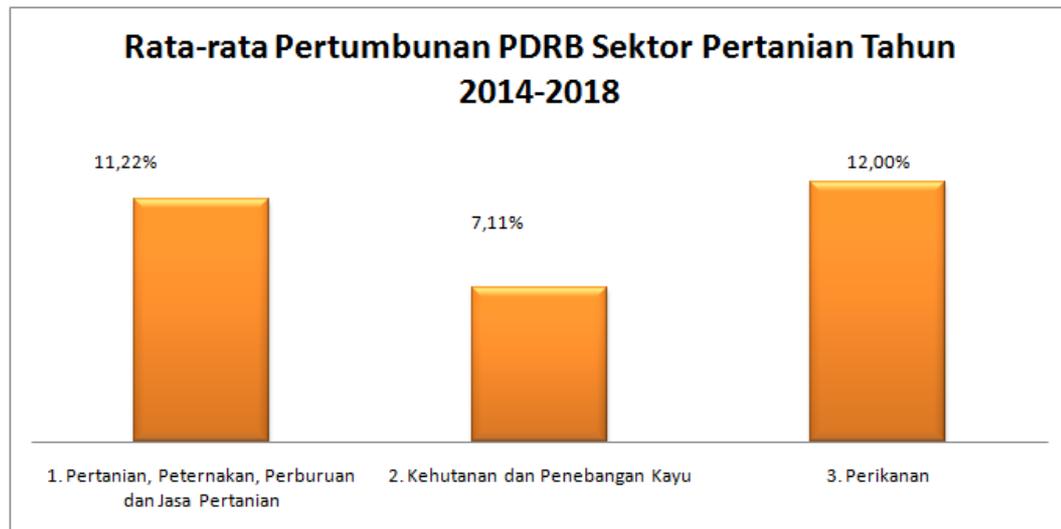
Tabel.10. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2010-2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan)	
		2010	2018
1	Kerinci	230.169	237.791
2	Merangin	334.925	383.480
3	Sarolangun	247.618	295.985
4	Batanghari	242.502	269.966
5	Muaro Jambi	345.090	432.305
6	Tanjung Jabung Timur	205.885	218.413
7	Tanjung Jabung Barat	280.169	328.343
8	Tebo	299.300	348.760
9	Bungo	304.833	367.182
10	Kota Jambi	534.500	598.103
11	Kota Sungai Penuh	82.619	89.944
Jumlah		3.107.610	3.570.272

Sumber : BPS (Data diolah)

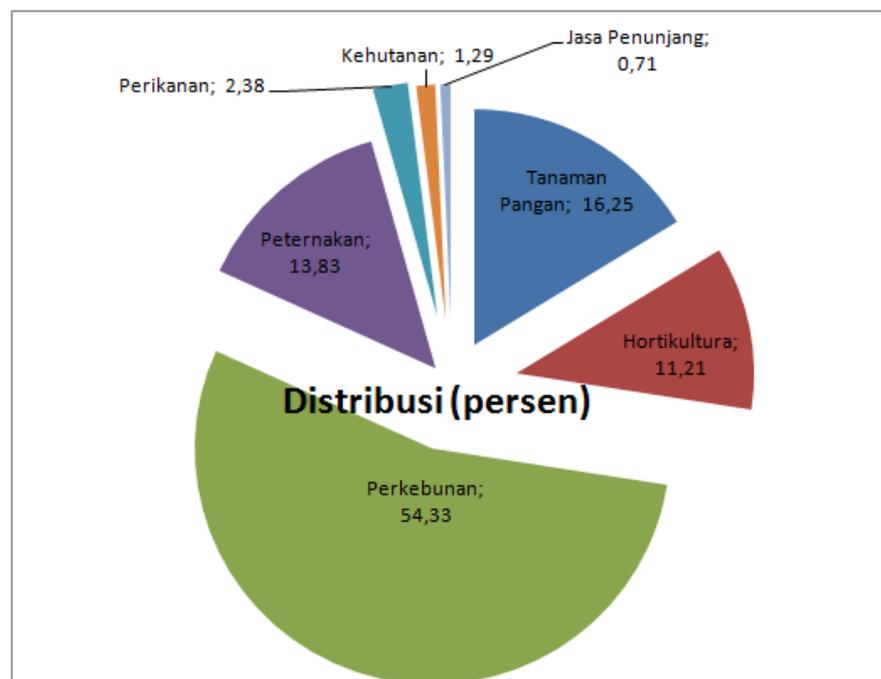
Berdasarkan data sensus kesejahteraan rakyat (BPS.2018) persentase penduduk Provinsi Jambi menempati wilayah perkotaan sebesar 50,61 untuk laki-laki, 49,39 untuk perempuan, sedangkan di perdesaan laki-laki sebesar 51,22 persen, perempuan sebesar 48,78 persen dengan total perbandingan seluruh penduduk Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin laki-laki 51,02 persen dan perempuan sebanyak 48,98 persen.

Berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian sebesar 47,35 persen, Industri Pengolahan sebesar 13,38 persen dan Jasa 39,27 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.721.362 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan turunannya masih mendominasi bidang pekerjaan yang digeluti dalam wilayah Provinsi Jambi.



Gambar.9. Grafik Rata-rata pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Subsektor perikanan mengalami kenaikan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap PDRB Menurut ADHB Provinsi Jambi, dimana selama Tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen, diikuti Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 11,22 persen serta Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 7,11 persen.



Grafik.10. Distribusi RTUP Sektor Pertanian Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Subsektor Perikanan yang terdiri dari budidaya perikanan dan penangkapan ikan sebesar 2,38 persen atau 18.251 rumah tangga dari 768.188 RTUP pertanian.

Untuk lebih detail dalam Rumah Tangga Usaha Pertanian maka dapat dibedakan lagi dalam Jumlah RTUP Sub Sektor Yang diusahakan Sektor Pertanian, Jumlah RUTP Jenis Usaha Utama yang diusahakan dan Jumlah RUTP dengan sumber penghasilan utama sektor pertanian pada masing-masing daerah sebagai berikut;

Tabel.11. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Provinsi Jambi Menurut Sektor yang diusahakan, Jenis Usaha Utama dan Sumber penghasilan Utama Tahun 2018

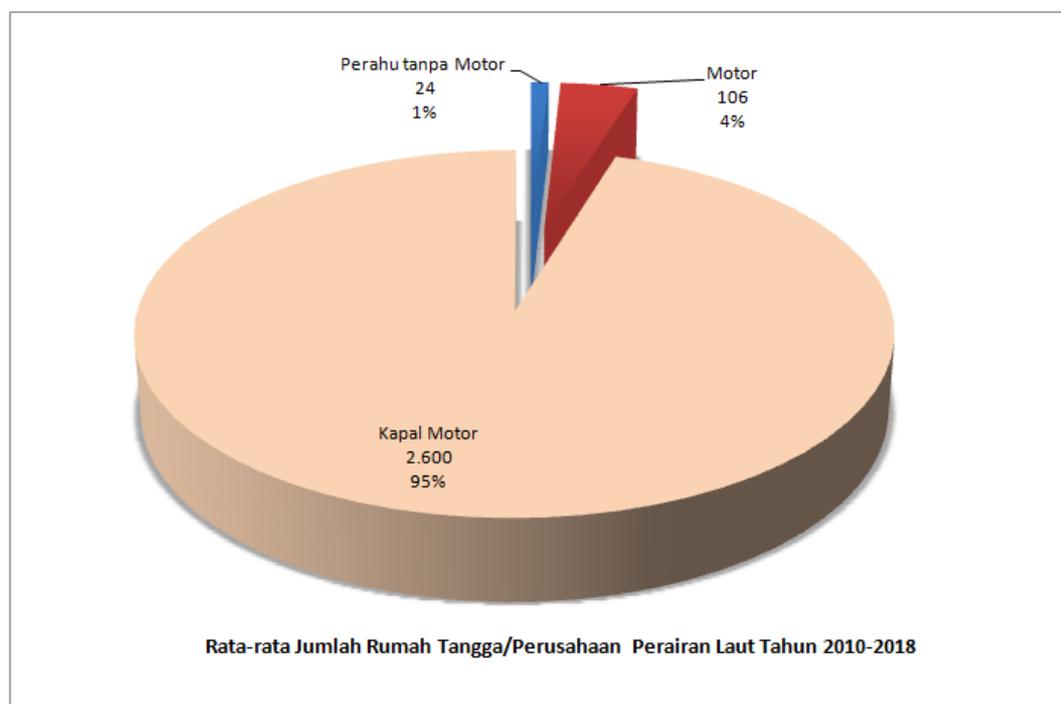
Kabupaten/ Kota	Jumlah RTUP Sub Sektor Yang diusahakan Sektor Pertanian 2018			Jumlah RUTP Jenis Usaha Utama yang diusahakan 2018			Jumlah RUTP dengan sumber penghasilan utama sektor pertanian 2018		
	Total	Per ikan an	%	Total	Per ikan an	%	Total	Per ikan an	%
KERINCI	93.549	1.018	1,09	51.487	335	0,65	39.366	39	0,10
MERANGIN	103.334	495	0,48	71.767	123	0,17	54.384	40	0,07
SAROLANGUN	77.855	1.265	1,62	55.707	490	0,88	40.516	46	0,11
BATANGHARI	63.534	1.168	1,84	39.363	327	0,83	26.444	148	0,56
MUARO JAMBI	68.862	1.983	2,88	46.783	1.313	2,81	32.768	25	0,08
TANJAB TIMUR	72.394	4.407	6,09	45.503	3.435	7,55	37.706	25	0,07
TANJAB BARAT	63.600	3.670	5,77	47.232	3.126	6,62	38.692	200	0,52
TEBO	110.610	1.009	0,91	68.755	172	0,25	56.061	12	0,02
BUNGO	83.409	1.297	1,55	51.509	295	0,57	40.931	76	0,19
KOTA JAMBI	15.764	1.595	10,12	10.083	1.060	10,51	3.244	6	0,18
KOTA SUNGAI PENUH	15.277	344	2,25	8.170	148	1,81	4.669	-	-
TOTAL JAMBI	768.188	18.251	2,38	496.359	10.824	2,18	374.781	617	0,16

Sumber : BPS. Data diolah

Pada Jumlah RTUP Sub Sektor Yang diusahakan Sektor Pertanian, Kota Jambi menempati urutan pertama pada kelompok ini sebesar 10,12 persen dan terkecil Kabupaten Merangin.

Pada Jumlah RUTP Jenis Usaha Utama yang diusahakan, Kota Jambi juga menempati urutan pertama sebesar 10,57 persen dan terkecil juga pada Kabupaten Merangin, dan sedangkan pada Jumlah RUTP dengan sumber penghasilan utama sektor pertanian, Kabupaten Batanghari menempati urutan pertama sebesar 0,56 persen.

Pada Rumah Tangga Perikanan Laut, pada Tahun 2010-2018 yang didominasi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat didapat data berikut ;

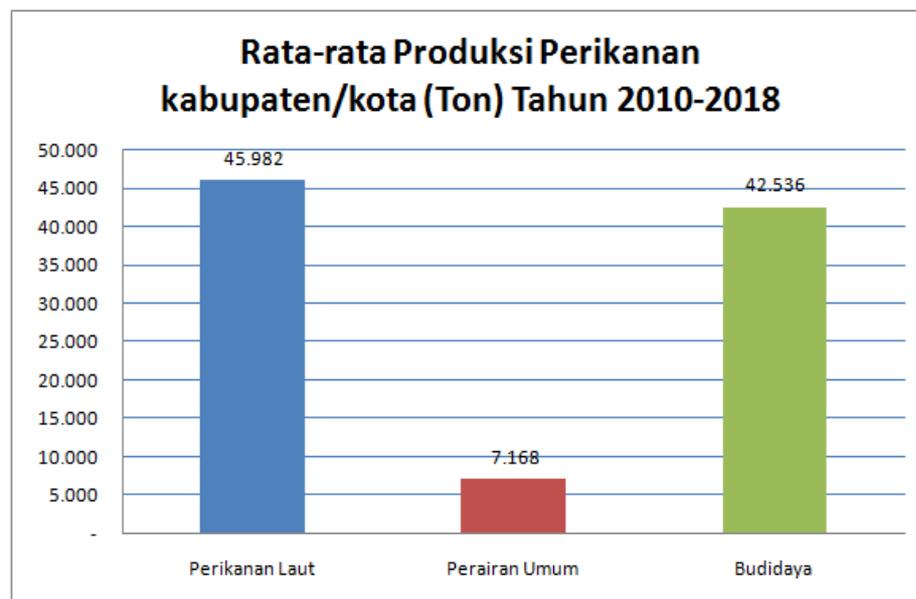


Gambar.11. Rata-rata Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Laut Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut yang didapat dua kabupaten memiliki Kapal motor rata-rata 2.600 rumah tangga atau sebesar 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga usaha perikanan laut sudah didominasi dengan kepemilikan kapal motor.

4.2. Analisis Ekonomi dan Basis Perikanan

Sebagaimana tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi sumber daya perikanan yang tidak bisa lepas dari produksi perikanan dan lainnya, maka data sekunder yang dianalisis sebagaimana bagian dibawah berikut



Gamba12. Rata-rata Produksi Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya. Statistik perikanan dibedakan atas data Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah.

Selama rentang waktu Tahun 2010 hingga 2018, perikanan tangkap laut masih mendominasi dalam produksi perikanan Provinsi Jambi sebesar 45.982 ton atau 48,06 persen, produksi perikanan budidaya sebesar 42.536 ton atau 44,45 persen dan produksi perairan umum 7.168

ton atau 7,49 persen. Adapun data Produksi perikanan berdasarkan wilayah pada Tahun 2018 selengkapnya sebagaimana berikut;

Tabel.12. Produksi Perikanan Tahun 2018 (ton)

Wilayah	Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat (Ton)			Jumlah
	Perikanan Darat (Budidaya)	Perikanan Darat (Perairan umum)	Perikanan Laut	
KERINCI	4.027,2	1.012,1	-	5.039,3
MERANGIN	1.412,8	847,0	-	2.259,8
SAROLANGUN	3.183,0	538,9	-	3.721,9
BATANGHARI	8.565,0	893,1	-	9.458,1
MUARO JAMBI	26.532,9	1.375,9	-	27.908,8
TANJUNG JABUNG TIMUR	669,2	462,3	23.886,4	25.017,9
TANJUNG JABUNG BARAT	1.561,2	641,7	21.719,0	23.921,9
TEBO	1.098,4	284,5	-	1.382,9
BUNGO	894,1	235,9	-	1.130,0
KOTA JAMBI	2.392,2	670,6	-	3.062,8
KOTA SUNGAI PENUH	64,1	115,0	-	179,1
PROVINSI JAMBI	50.400,1	7.077,0	45.605,4	103.082,5
Persentase	48,89	6,87	44,24	100

Sumber: BPS.2019 (Data diolah)

Pada Data produksi Perikanan Laut hanya didapat dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbesar dengan nilai produksi 23.886,4 ton dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 21.719 ton. Pada data produksi Perikanan Darat, Kabupaten Muaro Jambi menempati urutan pertama sebagai penyumbang produksi dengan nilai 26.532,9 ton dan terkecil pada Kota Sungai penuh sebesar 64, ton. Begitu juga pada data produksi perikanan darat (perairan umum), Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan nilai produksi sebesar 1.375,9 ton.

Sedangkan pada produksi perikanan budidaya yang dikelompokkan dalam klasifikasi Kolam, Keramba, Tambak dan Sawah mengusahakan beberapa komoditi ikan yang utama antara lain Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan

Lele, Ikan Mas, Ikan Gurami dan jenis ikan lainnya. Produksi berdasarkan jenis ikan budidaya rentang waktu 2016-2018 didapat data sebagai mana tabel berikut;

Tabel.13. Produksi Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan (Ton)

Jenis Ikan	Kolam			Keramba			Sawah			Tambak		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ikan Mas	627,70	637,70	2.114,00	16,73	16,72	510,90	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Patin	0,00	0,00	16.714,00	0,00	0,00	3.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Tawes	23,60	23,90	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Nila	8.175,90	8.305,30	9.805,30	11.020,65	10.995,73	8.788,10	5,80	0,00	13,90	33,00	0,00	16,60
Ikan Mujair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Nilam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Ikan Gurami	495,40	503,30	1.283,20	36,48	36,39	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Sepat	32,60	0,00	14,10	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Tembakan	2,50	2,50	2,90	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Lele	6.151,00	6.248,30	6.720,70	112,41	112,20	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikan Lainnya	19.815,80	20.162,50	181,20	2.159,39	2.159,60	12,70	2,20	0,00	0,00	697,00	0,00	790,70
Total	35.324,50	35.883,50	36.835,40	13.352,56	13.322,14	12.742,00	11,30	0,00	14,80	730,00	0,00	807,30

Rata-rata produksi perikanan darat budidaya, komoditi ikan Nila menempati nilai tertinggi yakni 19.053,43 ton, dari data tersebut, produksi perikanan budidaya ikan nila tertinggi dalam budidaya keramba dan kolam.

Produksi Perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata 25.493,9 ton dan Kabupaten Batanhari sebesar 10.191,9 ton untuk berbagai komoditi jenis ikan.

Perkembangan produksi perikanan tangkap di perairan umum juga dipengaruhi oleh perkembangan jumlah alat penangkapan ikan yang digunakan oleh petani ikan/nelayan/pelaku usaha perikanan, adapun perkembangan alat tangkap dan jenisnya dapat dilihat pada data tabel berikut;

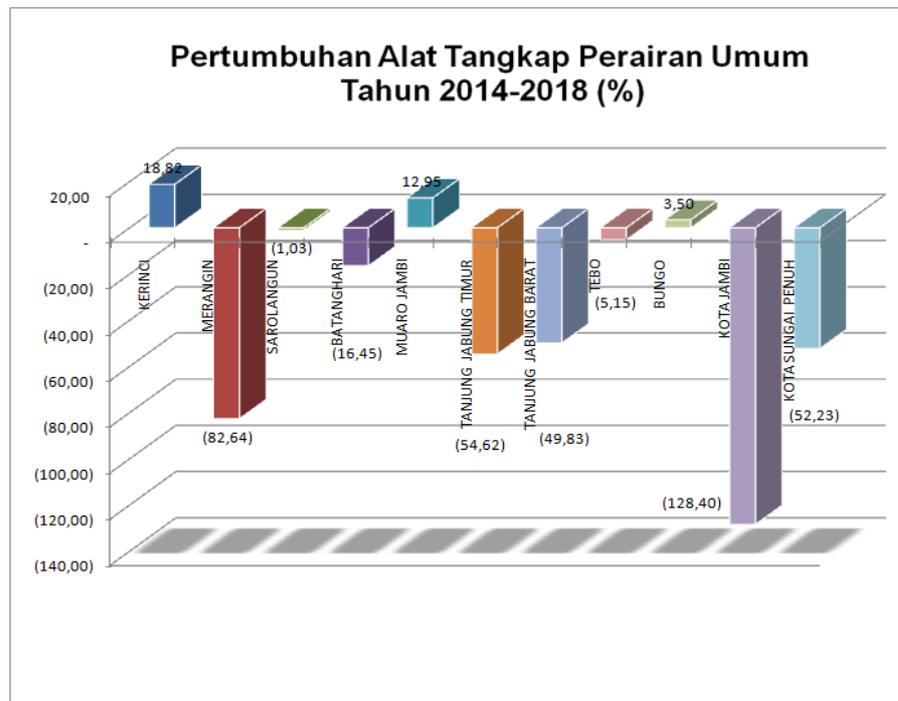
Tabel.14. Perkembangan Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Jenisnya di Perairan Umum

Jenis Alat Tangkap	2016	2017	2018	Pertumbuhan
Jaring Insang Hanyut	2.186	2.186	2.201	0,34%
Jaring Insang Tetap	3.413	3.210	3.268	-2,15%
Anco	730	320	1.669	51,21%
Serok	464	987	2.717	141,98%
Rawai	987	960	760	-12,25%
Pancing	2.717	2.234	2.256	-8,88%
Pancing Serok	135	464	464	85,39%
Jermal	96	95	95	-0,52%
Bubu	1.818	2.368	2.368	14,13%
Jala Tebar	3.211	2.995	2.895	-5,05%
Lainnya	9.255	390	391	-79,45%
TOTAL	25.012	16.209	19.084	

Sumber: BPS.2017-2019 (Data diolah)

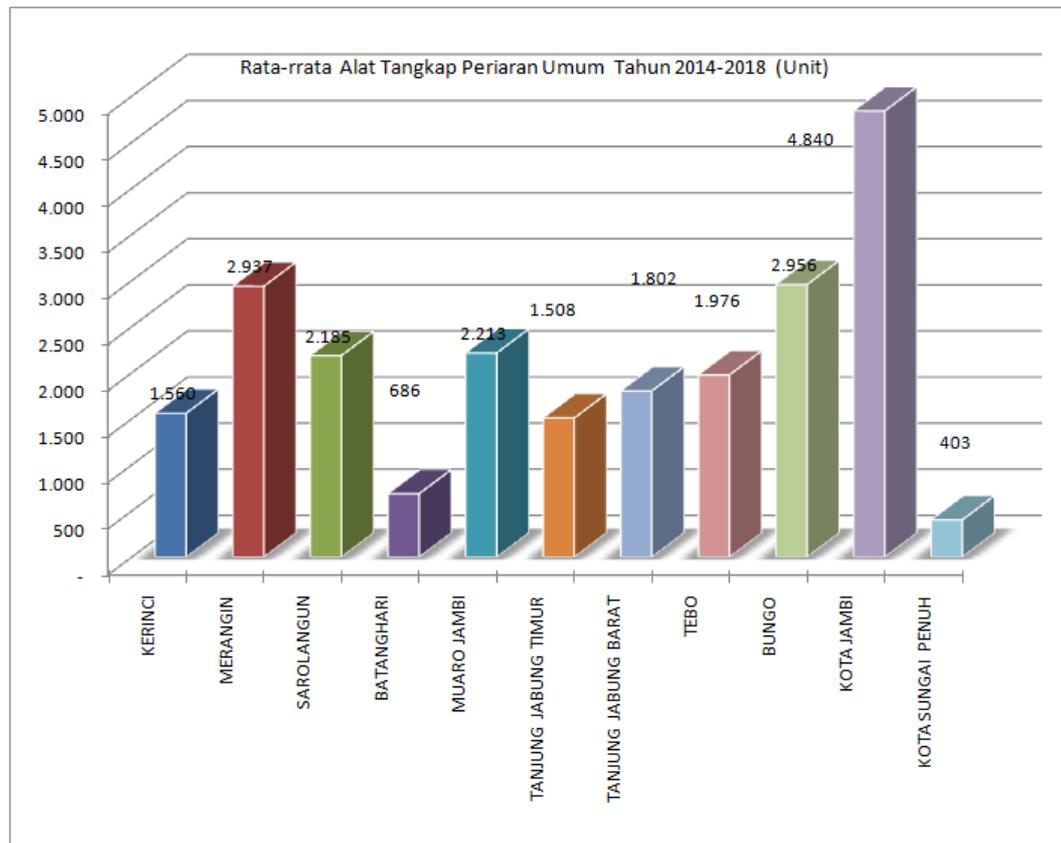
Ada beberapa data dalam hasil olahan data alat tangkap dari berbagai jenis yang signifikan antara lain Serok dan Pancing Serok. Terdapat pertumbuhan sebesar 141,98 persen atau penambahan sejumlah 2.253 unit dan 939 unit untuk pancing serok.

Sedangkan pertumbuhan alat tangkap di perairan umum berdasarkan wilayah selama tahun 2014-2018 sebagai berikut ;



Gambar. 13. Grafik Pertumbuhan Alat Tangkap Perairan Umum berdasarkan Wilayah Tahun 2014-2018

Perkembangan alat tangkap di perairan umum secara besar mengalami penurunan, yang terbesar terjadi pada Kota Jambi yakni turun sebesar 128,40 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan pada Kabupaten Kerinci sebesar 18,82 persen. Yang dominan terjadi peningkatan adalah jala tebar dan Jaring Insang Tetap. Meskipun terjadi penurunan dalam pertumbuhan alat tangkap di Kota Jambi, namun tetap mendominasi dalam jumlah alat tangkap sebagaimana gambar berikut;



Gambar. 1.4 Grafik Rata-rata Alat Tangkap Perairan Umum berdasarkan Wilayah Tahun 2014-2018

Kota Jambi terbesar dalam memiliki alat tangkap perairan umum dengan 4.840 alat tangkap dengan jumlah terbesar alat pancing pada tahun 2015 dan 2016.

Dalam mencapai tujuan dokumen analisis, maka perlu ditinjau dalam aspek komoditi basis yang berhubungan dengan sumberdaya Perikanan dalam wilayah Provinsi Jambi.

Tabel.15. LQ Produksi Perikanan, kabupaten/kota

No	Jenis Perairan	Kabupaten/Kota	Tipologi	Spesialisasi Indeks
1	Perikanan Laut (2 Daerah)	Tanjung Jabung Timur (1,98)	Potensial	47,18
		Tanjung Jabung Barat (1,83)	Prima	39,62
2	Perairan Umum (7 Daerah)	Merangin (5,83)	Prima	36,16
		Kota Sungai Penuh (5,35)	Potensial	31,05
		Kerinci (3,88)	Prima	20,48
		Tebo (3,47)	Prima	18,59
		Bungo (2,95)	Prima	14,55
		Kota Jambi (2,89)	Prima	14,16
		Sarolangun (2,73)	Prima	12,95
		Batang Hari (2,18)	Prima	50,36
		Muaro Jambi (2,15)	Potensial	49,69
3	Perikanan Budidaya (9 Daerah)	Sarolangun (1,82)	Prima	35,10
		Kota Jambi (1,80)	Prima	33,90
		Bungo (1,78)	Prima	33,50
		Tebo (1,69)	Prima	29,47
		Kerinci (1,60)	Potensial	27,58
		Kota Sungai Penuh (1,39)	Prima	17,00
		Merangin (1,28)	Prima	11,90

Sumber : BPS Provinsi Jambi (Data diolah)

Dari tabel nilai LQ produksi Perikanan pada jenis perairan laut nilai LQ tertinggi dan termasuk kedalam basis komoditi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 1,98 dan bertipologi potensial dan Tanjung Jabung Barat memiliki nilai 1,83 namun bertipoloagi Prima.

Tabel.16. LQ Perairan Darat; Budidaya Ikan Kolam, Keramba, Sawah, Tambak

No	Perairan Darat	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kolam	Merangin (1,98) Sarolangun (1,39) Kota Sungai Penuh (1,39) Bungo (1,28) Tebo (1,16) Kerinci (1,08) Tanjab Barat (1,05) Muaro Jambi (1,03)	BASIS
2	Keramba	Kota Jambi (0,70)	Non Basis Dengan LQ Tertinggi
3	Sawah	-	-
4	Tambak	-	-

4.3. Analisis Penentuan Faktor-faktor penentuan komoditas sasaran secara berkelanjutan

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan (FAO, 1997).

Maka dalam analisis ini untuk menentukan bobot-bobot faktor-faktor penentu komoditas berdasarkan komoditas unggulan dan spesialisasi digunakan teknik analisis Analitical Hierarchy Process (AHP), yaitu suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu pemecahan terhadap permasalahan yang kompleks dengan banyak kriteria dan melibatkan banyak variabel. Penentuan komoditas ini diharapkan pemanfaatan sumberdaya alokasi dapat tepat dan terarah sehingga diharapkan menghasilkan manfaat yang luas untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi umumnya.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian setiap tingkat kepentingan setiap variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Berikut adalah tahapan dalam analisis AHP;

1. Identifikasi permasalahan
2. Sintesa hierarki
3. Penyebaran kuesoner
4. Pengolahan matriks berpasangan
5. Perhitungan bobot kriteria.

Adapun dalam penentuan Jenis perikanan unggulan pilihan berdasarkan kriteria-kriteria ; (A1) Dukungan Pemerintah; (A2) Mutu dan Harga Produk Perikanan ;(A3) Potensial Pasar; (A4) Kemampuan Investasi/Modal (A5) Sumberdaya Manusia .

Sedangkan sebagai alternatif pilihan pengembangan sumberdaya berdasarkan jenis / klasifikasi perikanan baik tangkap maupun budidaya yakni Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya..

Dari hasil analisis LQ dan SSA telah didapatkan jenis komoditas unggulan dari beberapa komoditi di masing-masing daerah kabupaten/kota. Dari komoditi tersebut akan ditentukan komoditi prioritas pengembangan berdasarkan tinjauan kebijakan pemerintah yang dikompilasikan dengan kriteria lain seperti di atas, dengan nilai Matriks Perbandingan Berpasangan antar kriteria dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.17. Bobot Antar Kriteria

Kriteria Strategi	A1	A2	A3	A4	A5
A1 Dukungan Pemerintah	1,00	0,20	0,14	0,33	0,33
A2 Mutu dan Harga Produk	5,00	0,20	0,50	5,00	5,00
A3 Potensial Pasar	5,00	2,00	1,00	7,00	7,00
A4 Kemampuan Investasi/Modal	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
A5 Sumber Daya Manusia	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
	17,00	2,80	1,93	14,33	14,33

Tabel.18. Nilai Eigen Kriteria

A1	A2	A3	A4	A5	Rata-rata	Total Baris	Eigen Value
0,06	0,07	0,07	0,02	0,02	0,050	0,251	0,24
0,29	0,07	0,26	0,35	0,35	0,264	1,322	1,48
0,29	0,71	0,52	0,49	0,49	0,501	2,504	2,57
0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,092	0,462	0,46
0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,092	0,462	0,46
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		λ maks	5,21

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lainnya, dan dalam hal ini dapat mengarah kepada ketidak konsistensian.

$$CI = (5,21 - 5) / (5-1) = 0,051$$

$$RI = 1,120 \text{ (Tabel RI kriteria 5)}$$

$$CR = 0,051/1,120 = \mathbf{0,046}$$

Nilai 0,046 < 0,1 berarti memiliki nilai yang konsistensi.

Maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan selanjutnya dengan perbandingan antar Alternatif pada setiap kriteria, untuk lebih jelasnya alternatif pengembangan pada subsektor perikanan dalam wilayah Provinsi Jambi;

Tabel.19. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Jenis Perikanan

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Perikanan Laut	0,15	0,26	0,15	0,48	0,08	0,203	2
2	Perairan Umum	0,16	0,08	0,16	0,05	0,19	0,131	3
3	Budidaya	0,69	0,66	0,69	0,48	0,72	0,666	1

Perikanan Budidaya menempati peringkat 1 dengan bobot 0,666, Perikanan Tangkap Laut peringkat 2 dengan bobot 0,203 dan Perairan Umum dengan bobot 0,131. Nilai ini dapat diterjemahkan bahwa perikanan budidaya dapat dijadikan prioritas tujuan dalam pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat dan daerah serta menjaga lingkungan agar tetap dalam keadaan yang optimal.

4.4. Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat

Undang-undang No 45 Tahun 2009 dalam pasal 25c, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan landasan peningkatan perekonomian tanpa mengenyampingkan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang ada dengan memanfaatkan potensi maka perlu dibuat suatu strategi dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal dalam usaha perikanan budidaya.

Landasan pengambilan strategi pengembangan perikanan budidaya berdasarkan hasil perhitungan analisa sebelumnya dalam Analytical Hierarchy Process (AHP).

Analisis Matriks IFAS (Internal Faktor Analisis System)

Dalam analisis SWOT untuk menemukan kondisi pengembangan saat ini dalam pengembangan perikanan berbasis masyarakat perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dilakukan pemberian bobot dan peringkat untuk setiap aspek yang diidentifikasi pada empat komponen analisis SWOT. Hasil pemberian bobot untuk faktor-faktor internal-eksternal disajikan pada Tabel berikut;

Tabel. 20. Bobot dan Rating untuk faktor internal.

Faktor Strategis Internal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
KEKUATAN				
1.	Tersedianya Wilayah Potensial Perikanan	0,12	4,38	0,54
2.	Komoditi ikan yang bervariasi	0,12	4,50	0,56
3.	Adanya Tenaga kerja dan RT Usaha Perikanan	0,10	4,13	0,41
4.	Lingkungan Sumberdaya yang relatif belum tercemar	0,10	3,75	0,37
5.	Adanya kawasan lindung dan konservasi perikanan	0,10	3,25	0,32
6.	Kebijakan Pemerintah, mengenai pengembangan subsektor perikanan	0,07	3,38	0,25
Sub Total Kekuatan		0,62		2,44
KELEMAHAN				
1.	Status dan kedudukan usaha	0,07	3,38	0,25
2.	Pemasaran Hasil Olahan	0,12	3,50	0,43
3.	Kualitas Induk yang belum memenuhi standard	0,07	3,13	0,23
4.	Keterbatasan Penyuluh Budidaya	0,05	3,13	0,15
5.	Kualitas SDM yang relatif masih rendah	0,06	3,13	0,19
Sub Total Kelemahan		0,38		1,26
Total Internal (Strength-Weakness)		1,00		3,71

Tabel. 21. Bobot dan Rating untuk Faktor Eksternal.

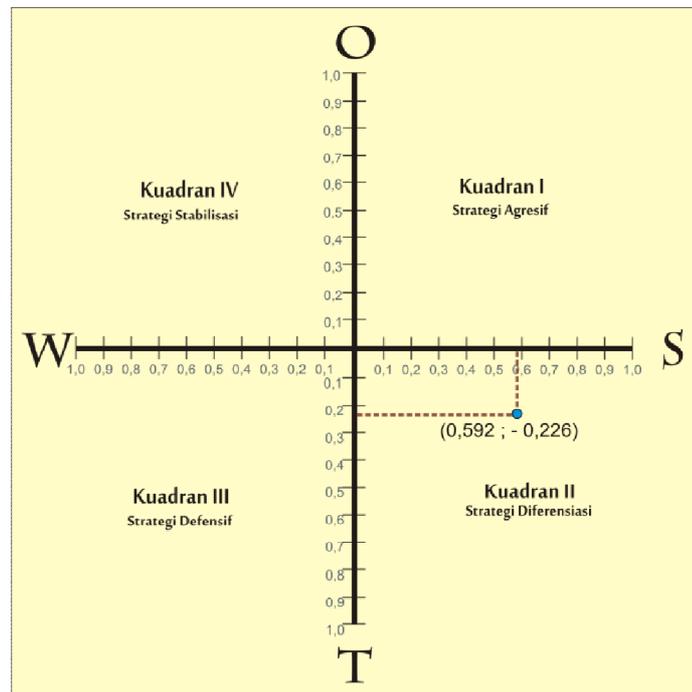
Faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
PELUANG				
1.	Permintaan ikan yang tinggi	0,13	4,50	0,58
2.	Jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi	0,11	4,13	0,47
3.	Minat Masyarakat untuk melakukan budidaya	0,10	3,88	0,38
4.	Adanya perkembangan teknologi perikanan	0,06	4,38	0,28
Sub Total Kekuatan		0,40		1,77
ANCAMAN				
1.	Harga pakan yang tinggi	0,10	3,88	0,38
2.	Degradasi lingkungan Sumberdaya	0,13	4,00	0,52
3.	Adanya konflik kepentingan pemanfaatan SDA	0,05	2,88	0,14
4.	Potensi Bencana Alam Banjir	0,16	3,50	0,56
5.	Pencurian Ikan	0,06	3,63	0,23
6.	Harga produk yang relatif kurang stabil	0,10	3,38	0,33
Sub Total Kelemahan		0,60		2,16
Total Internal (Strength-Opportunities)		1,00		3,86

<i>EFAS</i> \ <i>IFAS</i>	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakness)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI (SO) = 2,44 + 1,70 = 4,15	STRATEGI (WO) = 1,26 + 1,70 = 2,96
ANCAMAN (Threats)	STRATEGI (ST) = 2,44 + 2,16 = 4,60	STRATEGI (WT) = 1,26 + 2,16 = 3,42

Gambar.15. Bagan Kombinasi Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat.

Sebagaimana terlihat di dalam Gambar.9, terdapat empat kelompok strategi berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi. Kombinasi strategi yang disajikan pada Tabel . Di atas merupakan analisis model kuantitatif perumusan strategi-strategi yang didasarkan pada jumlah nilai skor pada masing-masing faktor. Berdasarkan tabel tersebut maka kebijakan strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat pada Provinsi Jambi sebaiknya memanfaatkan strategi ST karena mempunyai nilai skor tertinggi jika dibandingkan dengan nilai skor yang lainnya yaitu 4,60. Selanjutnya diikuti dengan Strategi SO dengan skor 4,15 , strategi WT dengan skor 3,42, dan Strategi WO dengan skor 2,96.

Hasil selisih komponen kekuatan dan kelemahan ($2,44 - 1,26$) adalah 0,592 menjadi posisi titik pada sumbu X , sedangkan selisih komponen pada peluang dan tantangan ($1,70 - 2,16$) adalah -0,226 menjadi sumbu Y, sehingga yang menandakan kondisi strategi berada pada Kuadran II yaitu Strategi Diferensiasi menggambarkan bahwa situasi yang masoh karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengatasi/mengurangi ancaman yang digambarkan dalam bagan berikut;



Gambar.17. Kuadran Analisa SWOT

Strategi ST (*investment divestment*) menggunakan kekuatan sebuah Perusahaan/organisasi/kebijakan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman external. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan external.

Strategi Strengths-Threats (ST)

Strategi ini dibuat berdasarkan strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk menghadapi ancaman atau meminimalisirnya yang dapat dilakukan dengan ;

- Menggunakan sumberdaya alam dalam ketersediaan wilayah yang potensial dalam budidaya perikanan yang kurang berdampak dari potensi bencana alam banjir.
- Melakukan budidaya perikanan dengan pilihan komoditi perikanan yang tepat dan bernilai ekonomis tinggi dalam menghadapi kendala biaya produksi harga pakan yang seimbang;

- Memperkuat regulasi ditingkat daerah dalam melindungi usaha dan tindakan hukum yang berat kepada pihak-pihak yang melakukan usaha perusakan sumberdaya perikanan;
- Memanfaatkan Tenaga kerja dalam rumah tangga dalam usaha perikanan sehingga dapat menekan biaya usaha perikanan.

Dari hasil analisa SWOT yang menghasilkan strategi **Strengths-Threats (ST)** maka selaku pemangku kebijakan strategis dapat melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut;

- Membangkitkan industri hulu dan hilir perikanan, sehingga menyerap tenaga kerja yang tersedia;
- Membuka jalur pemasaran produksi perikanan dan hasil olahan perikanan dengan pihak swasta dan daerah lain guna menampung hasil produk perikanan tersebut;
- Sosialisasi regulasi kelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum agar terjaga plasma nuftah perikanan;
- Memfasilitasi penelitian dan penemuan agar terciptanya pakan yang terjangkau dan memenuhi standard.

Langkah Strategis

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

- a. Pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan.
- b. Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Iptek Dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.
- c. Pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, akses, mutu keamanan pangan (perikanan) dan peningkatan usaha serta investasi bidang perikanan.

- d. Melakukan percepatan rehabilitasi ekosistem (seperti re-stocking) dan cadangan Sumber daya Alam Perikanan melalui program sinergis lintas sektoral.

Kebijakan

- a. Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan
- b. Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan
- c. Memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan dan pengembangan budaya makan ikan.
- d. Perlindungan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui regulasi bertingkat.
- e. Peningkatan penyuluhan guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat.

Dalam tulisan ini penekanan ulasan terletak pada perairan umum air tawar, sehinggaperlunya menata strategi pengelolaan guna pelestarian sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat harus memiliki tujuan pengelolaan yang terarah yang dapat digambarkan dalam tujuan pengelolaan sebagai berikut;



Gambar. 17. Diagram Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan perikanan memiliki tujuan ekonomi dan sosial, dalam jangka panjang atas sumberdaya perikanan secara berkesinambungan, dan untuk bertujuan untuk pemanfaatan diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumberdaya yang tersedia. Menjaga spesies target berada di tingkat atau di atas tingkat yang diperlukan untuk menjamin produktivitas yang berkelanjutan. Meminimalkan berbagai dampak penangkapan atas lingkungan disik dan atas non-target (hasil tangkapan sampingan, *by catch*).

Memaksimumkan pendapatan bersih bagi nelayan yang terlibat dalam perikanan sebagai **tujuan ekonomi** dalam pengelolaan perikanan ini serta memaksimumkan kesempatan kerja bagi mereka yang tergantung

pada perikanan bagi kelangsungan kehidupan mereka sebagai **tujuan sosial** dalam pengelolaan perikanan.

Menurut Ningsih dan Heri (2012), bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena:

- a. kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat,
- b. pada umumnya *ouput* dapat diekspor, sedangkan *input* berasal dari sumber daya lokal,
- c. dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak,
- d. umumnya berlangsung di daerah,
- e. industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui (*renewable resources*), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

White *et al.*(1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam keterlibatan masyarakat yang sukses dalam pengelolaan dengan pendekatan berbasis masyarakat, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan ekologi yang umum dipahami masyarakat (*popular ecological knowledge*)
- b. Sistem manajemen tradisional (*traditional management systems*) yang dapat menjadi dasar dalam sistem manajemen baru,
- c. Kepemilikan sumberdaya (*ownership of resources*)
- d. Integrasi inisiatif manajemen (*integration of management initiatives*)
- e. Tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat (*response to community needs*)
- f. Penerimaan oleh masyarakat (*acceptance of solution by the community*)
- g. Efisiensi dan keefektifan manajemen (*efficiency and efficacy of management*)
- h. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)

- i. Keragaman pemecahan masalah (*diversity of solution*)
- j. Keragaman budaya (*cultural diversity*).

Wadah dan Perairan Budidaya

Pemacuan produksi perikanan budidaya secara intensif dan ekstensif dengan menggunakan pakan berdampak terhadap peningkatan bahan organik dalam perairan dalam bentuk sisa pakan dan feses. Penyebabnya diduga Dalam memacu produksi dan adanya kelebihan kapasitas perikanan budidaya, terutama di perairan umum daratan seperti waduk, sungai dan danau atau banyaknya pakan terbuang akibat kelebihan pemberian pakan atau jeleknya kualitas pakan.

Penurunan kualitas perairan akibat eutrofikasi menciptakan kondisi perairan budidaya kekurangan oksigen, dan peningkatan bahan beracun seperti amoniak yang menyebabkan kematian masal secara reguler .(Nastiti et al., 2001; Riyadi, 2006; Aisyah & Subehi, 2012; Tatangindatu et al., 2013) dan atau peningkatan serangan penyakit. Hal demikian jika terjadi akan menyebabkan penutupan usaha budidaya akibat merugi, selanjutnya akan mengganggu penyediaan ikan bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan budidaya ikan air tawar secara ramah lingkungan. Budidaya ikan yang dimaksud adalah proses pembesaran ikan hingga mencapai ukuran pasar.

Wadah budidaya ikan air terbagi menjadi 2, yaitu di darat dan perairan umum daratan. Daratan yang dapat dimanfaatkan berupa lahan produktif yang mempunyai sumber air dari irigasi dan atau langsung dari sungai atau anak sungai dan lahan marginal miskin air yang mengandalkan sumber air dari air sumur atau air tanah dan lahan marginal gambut yang mengandalkan sumber air dari air permukaan.

Bentuk dari wadah budidaya ikan di daratan yaitu kolam tanah, kolam semen (kolam air deras) dan kolam terpal. Kolam air deras mulai

berkembang semenjak tahun 1985 di Kabupaten Bogor, dikenalkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT). Di Kalimantan Selatan, masyarakat membuat wadah pengebakan ikan di daerah rawa banjiran dengan menggali tanah berbentuk segi empat dan meninggikan pematangnya dimana pada permukaan air menyusut, ikan liar dari perairan sekitarnya akan masuk ke dalam jebakan tersebut. Kolam demikian dikenal dengan sebutan **Beje** (Kartamihardja, 2002; Sunarno, 2006). **Beje** hingga saat ini masih berlangsung dan berisi jenis ikan yang tergolong ke dalam black fish.

Budidaya ikan di perairan umum daratan berupa keramba dimulai di Cianjur dengan menancapkan bilahan bambu berbentuk segi empat di sepanjang saluran air atau anak sungai di sekitar rumah penduduk (Bardach et al., 1972). Di Jambi dan Kalimantan Timur serta Kalimantan Barat, bilahan kayu dibentuk menjadi segi empat dan diapungkan oleh bundelan bambu dan atau balok kayu yang ditempatkan di bawah dan atau di sekitar rumah apung, dikenal dengan keramba (Reksalegora, 1979). (Syamsunarno, Mas B, Sunarno .2016)

Semenjak dibangunnya waduk di Jawa Barat (tepatnya waduk Cirata), pemerintah mengenalkan budidaya ikan dalam keramba jaring apung (KJA) sebagai sumber alternatif pendapatan keluarga yang tergenangi lahannya. Teknologi KJA dikenalkan oleh BPPBAT Bogor. Secara tradisonal, masyarakat yang tinggal di sekitar rawa di Sumatera dan Kalimantan membuat hampang yang terbuat dari jaring yang ditanam dalam dasar perairan yang dipasang di sepanjang pinggir perairan.

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum

Tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (over exploitation), investasi berlebihan (over investment) dan tenaga kerja berlebihan (over employment).

Kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan diperairan umum daratan sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya Pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bentuk pengelolaan yang berbasis masyarakat. Masyarakat lokal memiliki sistem sendiri di dalam mengelola sumberdaya alam yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Penggalan terhadap nilai kearifan lokal yang ada atau pernah ada di dalam kehidupan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan mutlak diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan berbasis masyarakat (Hendrik, 2007; Kartamihardja. *et al*),2014).

Dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan, Masyarakat dan Pemerintah Jambi telah mengembangkan kawasan perlindungan berbasis kearifan lokal, yakni Suaka Mina dan Lubuk Larangan. Perbedaannya, jika Suaka Mina merupakan satu kawasan yang sama sekali ikannya tidak boleh ditangkap, ikan di Lubuk Larangan boleh dipanen namun diatur sesuai adat setempat. Hukum adat setempat sekaligus merupakan manifestasi dari kearifan lokal berisi aturan yaitu dengan membiarkan sebuah lubuk sungai selama 6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen, ikan punya cukup waktu untuk berkembang biak.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (*Community Based Fisheries Management / CBFM*) didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu menentukan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk menentukan kesejahteraannya (Nikijuluw, 2002 dalam Kartamihardja *et al*, 2014). King (1995) menyatakan bahwa ada hubungan erat antara sumberdaya ikan (stok) dan pemanfaatan sumberdaya ikan didalam konsep pengelolaan perikanan. Pernyataan Banon & Nugroho(2011) memperjelas bahwa suatu pengelolaan perikanan selalu berhadapan dengan permasalahan dasar yaitu dimensi manusia (*human dimension*). Dalam hal ini,

masyarakat lokal sebagai pemanfaat yang berhubungan secara langsung dengan sumberdaya ikan. Pengelolaan berbasis masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah lokal umumnya lebih efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting didalam pengelolaan kawasan konservasi dan keberlanjutan sumberdaya ikan (Kartamihardja *et al* .,2014).

Pengembangan Pakan Lokal

Harga pakan hingga saat ini menjadi masalah utama dalam pengembangan budidaya ikan air tawar. Pembudidaya menggunakan pakan lokal yang berharga murah, namun berkualitas di bawah SNI (Sunarno & Marson, 2011). Akibat-nya adalah perairan budidaya dipenuhi oleh limbah pakan dan feses yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan berbagai macam penyakit. Penerapan pakan lokal efisien dan ekonomis telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta (Sunarno, 2012) dan Kabupaten Kampar (Sunarno *et al.*, 2013). Keberhasilan penggunaan pakan lokal berkualitas SNI dengan harga kompetitif perlu dikembangkan terus. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP mengembangkan pakan lokal mulai program GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri) di sentra-sentra budidaya air tawar khususnya di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Proses produksi ikan dalam wadah budidaya ikan diawali dengan mengandalkan pakan alami dan atau tambahan berupa dedak, sisa kegiatan rumah tangga, dan sisa Pakan alami dan tambahan tidak lagi diandalkan oleh pembudidaya. Hal demikian membuka peluang bisnis pakan komersial di Indonesia.

Pakan yang dibutuhkan oleh budidaya ikan adalah pakan yang mengandung kelengkapan dan keseimbangan nutrien seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan ikan (Sunarno *et al.*, 2011). Kualitas pakan komersial ini dikontrol oleh

pemerintah dengan membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) pakan untuk budidaya ikan air tawar. Permasalahan harga pakan yang sering dikeluhkan oleh pembudidaya air tawar tetap tidak mengurangi kualitas pakan komersil. Upaya pembuatan pakan lokal untuk keperluan sendiri dan atau kelompok harus mengacu kualitasnya kepada SNI pakan ikan tersebut.

Regulasi Kelestarian Sumberdaya Perikanan.

Regulasi kelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum bertujuan agar terjaganya plasma nuftah perikanan agar selalu berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menerapkan strategi-strategi berbasis masyarakat.

1. Penerapan Eco-Labeling di sektor Perikanan.

Dalam upaya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan industri perikanan, perlindungan atau konservasi terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) ikan, maka dunia internasional telah sepakat memberikan dukungan terhadap rencana penerapan label yang disebut dengan “Eco-Labeling”. Landasan hukum yang digunakan adalah beberapa hasil atau nota kesepakatan dalam pertemuan/konfrensi Internasional. Hal ini menyangkut masalah peningkatan terhadap adanya perbaikan dalam pengelolaan/ manajemen dan perlindungan/konservasi terhadap keanekaragaman antara lain :

- 1) UN Convention on Law of the Sea and Ensuing Instruments, 1982.
- 2) Agreement on the Conservation and Management of Straddling fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (Straddling Stock Agreement), 1995.

- 3) FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on the High Seas (Compliance Agreement), 1993.
- 4) FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and the Technical Guidelines Development in Support its Implementation (the Precautionary Approach, to Improve Fisheries Management), 1995.
- 5) UN Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janeiro, Brazil, 1992.
- 6) Convention on Biological Diversity Gave Political Support to the Goals of Improve Fisheries Management as Well as to Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity, 1992.
- 7) Convention on Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) Highlights International Support for the Principle of Protecting Endangered Species, 1973.

Rencana atau inisiatif terhadap penerapan Eco-Labeling di sektor perikanan tujuannya adalah untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan produk-produk hasil perikanan kepada konsumen. Oleh karena itu, penerapan Eco-Labeling ini diharapkan dapat menciptakan insentif pasar yang berbasis pada isu lingkungan seperti produk dan cara pengolahan yang ramah lingkungan.

Selain itu, penggunaan Eco-Labeling juga diharapkan dapat melengkapi penggunaan label-label yang lainnya yang selama ini telah digunakan yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk memenuhi hak konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap pembelian suatu produk. Dalam penerapannya dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).

Dalam hal mandatory Eco-Labeling, harus mendapat dukungan yang kuat pemerintah melalui aturan-aturannya terutama yang berkaitan dengan aturan impor yang ketat (*restrictive trade*) terhadap produk perikanan, seperti kalau terdapat impor perikanan yang tidak memenuhi

penggunaan Eco-Labeling produk tersebut harus ditolak, begitu juga terhadap produk lokal kalau tidak produknya tidak menggunakan Eco-Labeling harus dikenakan sanksi.

Pelabelan Ramah Lingkungan (PRL) merupakan pemberian label pada produk sebagai penyedia informasi bagi konsumen untuk menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan untuk menciptakan insentif berbasis pasar demi pengelolaan perikanan yang lebih baik. (Gardiner Visnawathan 2004; Nunes dan Riyanto 2005; FAO 2007; Wynne 1994; Leubuscher 1998 *dalam* Ibanez et.al 2008).

PRL merupakan sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada para mata rantai perdagangan ikan hias. Sertifikat ini diberikan kepada para nelayan, pengepul, dan eksportir. Pemegang sertifikat ini sudah seharusnya menerapkan standar operasional yang ditetapkan suatu lembaga untuk mendapatkan hasil produk yang ramah lingkungan dan dapat diberik label, ecolabel.

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi : Suaka Perikanan

Suaka perikanan merupakan suatu ekosistem perairan yang memiliki daerah yang terbatas dimana melarang semua kegiatan penangkapan biota perairan dengan cara apapun, kapanpun dan oleh siapapun. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai tempat pelestarian ikan-ikan endemik yang langka (atau hampir punah) dan beberapa spesies yang dilindungi keberadaannya.

Selain itu pengawasan pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh Masyarakat sekitar kawasan dalam suatu badan. Masyarakat tersebut ikut serta dan berperan aktif dalam kelestarian kawasan melalui kegiatan pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan. Selain itu Badan ini juga memelihara dan mnegakkan kebiasaan atau adat istiadat penangkapan dan pengelolaan serta

menyelesaikan persoalan-persoalan terhadap pelanggaran ketentuan adat yang berlaku.

Suaka perikanan yang ada di Propinsi Jambi sekitar 28 buah dan pada umumnya aktif sebagai daerah suaka (*reservat*). Suaka perikanan yang ada di daerah Jambi pada umumnya merupakan daerah Rawa banjiran (*Oxbow*) yang banyak tumbuhan air (sekitar 20-50%) dan mempunyai hubungan dengan sungai, dimana saat musim hujan luasannya bertambah dan saat musim kemarau perairan ini mengecil bahkan ada yang sampai kering.

Rata-rata luas dari daerah suaka perikanan ini berkisar antara 2-400 ha dengan kedalaman rata-rata sekitar 2-10m (Tabel 3). Selain itu ada yang disebut Lubuk larangan yaitu suatu wilayah tertentu yang oleh sekelompok masyarakat dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan pada keputusan adat, dan pada umumnya panjang lubuk larangan tersebut

Sekitar 200-300 m dan selebar sungai atau anak sungai yang ada. Lubuk larangan ini pada waktu tertentu ditutup untuk tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan apapun dan akan dibuka kembali untuk dilakukan penangkapan ikan secara bersama-sama. Kegiatan pembukaan lubuk larangan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun atau berdasarkan pada keputusan adat, jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda hewan beras, atau uang sesuai takaran kesalahannya. Pelarangan ini diberlakukan bagi komunitas kepemilikan wilayah setempat.

Memang secara legalitas sumpah adat ini tidak mengikat, namun sangat berpengaruh pada masyarakat, karena larangan penangkapan ataupun merusak sumberdaya hayati sangat ditakuti oleh masyarakat setempat, apalagi masyarakat diluar wilayah tersebut. Lubuk larangan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan konservasi walaupun tidak secara permanen dilakukan tapi pada dasarnya masyarakat menyadari bagaimana penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan yang ada

agar berkesinambungan. Di Propinsi Jambi ada sekitar 173 buah lubuk larangan, dan ini tersebar di beberapa kabupaten atau kota yang mempunyai sungai atau anak sungai.

Kondisi Suaka Perikanan yang ada di Propinsi Jambi keadaannya berbeda dengan yang ada di wilayah Kalimantan, Suaka perikanan yang ada pada umumnya sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada dan petunjuk pelaksanaan suaka perikanan (reservat) yaitu membagi 3 daerah dalam suaka perikanan yaitu daerah inti, penyangga, dan ekonomi.

Dengan adanya daerah-daerah ini akan memperjelas keberadaan suaka perikanan dengan fungsi-fungsi yang ada. Namun keadaan ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan ada beberapa suaka perikanan tidak jelas batas-batas tersebut sehingga banyak nelayan yang melakukan penangkapan di daerah inti dari suaka perikanan yang telah ditetapkan. Selain itu terlihat banyak di daerah suaka dilakukan banyak kegiatan usaha budidaya ikan dalam karamba maupun dalam bentuk lain.

Di lain pihak, keadaan suaka perikanan yang ada terutama di danau-danau pada umumnya sudah kurang sesuai lagi dengan ekosistem yang ada. Hal ini karena perairan yang dijadikan suaka keadaan kurang mendukung terutama banyaknya tumbuhan air, keadaan airnya semakin surut saat musim kering, keadaan kualitas airnya kurang layak, dan masyarakat nelayannya kurang mendukung keberadaan suaka perikanan yaitu dengan melakukan penangkapan di daerah inti yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat anco, jala tancap, dan alat tangkap lainnya serta kurang adanya pengawasan dari dinas terkait atau aparat desa.

Suaka Perikanan di wilayah Propinsi Jambi pada umumnya sudah memiliki ketetapan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat berupa Surat Keputusan baik dari Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas Perikanan Propinsi.

Sedangkan untuk lubuk larangan pada dasarnya merupakan suatu bentuk konservasi yang dibuat melalui aturan adat setempat (dalam suatu

dusun atau desa). Kondisi lubuk larangan ini pada umumnya baik, karena diawasi oleh pemuka desa atau dusun dan keberadaannya disekitar wilayah tempat tinggal sekelompok masyarakat yang memanfaatkannya.

Keberadaan lubuk larangan ini timbul, karena kelompok masyarakat disekitarnya merasa untuk melindungi sumber daya yang ada disekitar mereka, dan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (tidak punah). Aturan lubuk larangan ini cukup jelas, karena diawasi oleh pemuka desa atau agama dan barang siapa yang melanggar aturan ada tindakan dikenakan sanksi, dan keadaan ini berlaku di masyarakat sampai saat ini.

Lubuk-lubuk larangan yang ada dapat ditingkatkan secara konservasi menjadi daerah suaka jika masyarakat menginginkan dan ada sesuatu hal yang memungkinkan untuk menutup daerah tersebut untuk melakukan penangkapan atau kegiatan apapun, seperti daerah pemijahan ikan (*spawning ground*), daerah pembesaran (*nursery ground*), atau hal-hal tertentu. Penutupan daerah lubuk larangan menjadi daerah suaka juga berdasarkan pada persetujuan pemuka adat atau desa setempat dengan dinas perikanan setempat.

Disamping ecolabeling dan revitalisasi suaka perikanan, usaha penambangan emas tanpa izin (PETI) juga menjadi salah satu ancaman usaha perikanan dan kelestarian ikan asli di Jambi. Karena itu pemberantasan PETI di Jambi harus dilakukan secara menyeluruh dan intens. Jajaran penegak hukum di Provinsi Jambi perlu berkerja sama dengan masyarakat setempat guna mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas PETI. Hal ini penting karena kegiatan PETI dapat mengancam kesehatan masyarakat juga mengancam sumber daya perikanan. Kemudian penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penangkapan dengan menggunakan listrik, bom maupun racun harus diberantas.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pada hasil riset, keberhasilan model pengelolaan suaka perikanan terlihat pada penggunaan pola ko-manajemen yang dilengkapi oleh kemampuan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum dan bantuan lainnya. Dengan adanya penerapan pola ko-manajemen untuk pengelolaan suaka perikanan pada perairan umum daratan di Indonesia diharapkan akan didapatkan model pengelolaan suaka perikanan yang menghasilkan keberlanjutan sumber daya perikanan dan pendapatan masyarakat nelayan. Untuk itu, pengelolaan perairan seperti sungai dan rawa banjir dalam pembangunan perikanan mengikuti pertimbangan antara lain optimasi pemanfaatan sumber daya dan keseimbangan manfaat antar pengguna (Mellquist, 1992). Hal ini dapat berupa kebijakan mempertahankan upaya penangkapan pada suatu tingkat tertentu yang berhubungan dengan tujuan tertentu (Troade, 1992).

Dalam implementasi, pengembangan model pengelolaan suaka perikanan dilakukan dengan cara penetapan suaka perikanan, yang secara teknis mengikuti beberapa kaidah fungsi biologi dan ekologis yang sudah ada. Sementara itu, secara ekonomi berdampak terhadap upaya mempertahankan dan atau meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dan pada bagian akhir berdampak secara sosial dan kelembagaan. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di dalam pengelolaan suaka perikanan, dapat dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan penetapan kelompok kerja pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk di dalamnya pengelolaan suaka perikanan (pemerintah sebagai fasilitator).
2. Penetapan rencana pengelolaan suaka perikanan, termasuk unsur-unsur batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, dan aturan representasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat nelayan.

3. Penetapan pengawas dan sistem pengawasan pengaturan, termasuk aturan main penegakan peraturan yang telah ditetapkan pada tingkat masyarakat, sebelum sampai dengan sistem hukum positif.
4. Penetapan pengaturan yang berfungsi sebagai upaya mempertahankan kualitas biologi dan ekologi perairan umum, di samping pengaturan penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan serta musim penangkapan.

Saat ini paling sedikitnya tujuh spesies ikan air tawar Jambi yang mengalami kondisi kritis (*critical endanger*). Jenis ikan tersebut antara lain, arwana silver (*Schlerophages formosus*), ridiangus (*Balantiocheilos melanopterus*), belida (*Notopterus chitala*), baung (*Macrones nemurus*), sepat batik (*Cydochaichthys aroplos*), serandang (*Channa pleurophthalma*), dan tilan (*Mastacembelus erythrotaenia*).

Sejak 2015, Dinas KKP Jambi kerjasama Balai Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias Depok, Jawa Barat, guna mengembangkan pembibitan botia. Unit pelaksana teknis Balai Benih Ikan Daerah (BBID), Dinas KKP Jambi tengah menyiapkan prasana botia. Beberapa bak pemijahan dibuat khusus dengan masing-masing paralon untuk aliran air.

Selain botia, arwana silver mulai dipijahkan sejak dua tahun lalu untuk mendapatkan calon induk. Beberapa arwana dewasa dijual BBID Jambi untuk ikan hias, dan hasil penjualan akan masuk ke kas daerah. Induk arwana dan botia yang dikembangkan nantinya akan dipasok ke beberapa daerah lubang-lubuk larangan yang ada, selain itu juga akan dilepas liarkan di Sungai Batang Hari dengan harapan kondisi air sungai yang sekarang keruh bisa kembali bersih dan jernih agar baik untuk kehidupan ikan tersebut.

Karena banyaknya kendala dalam membudidayakan ikan air tawar asli Jambi dari 113 jenis ikan di perairan Jambi, saat ini baru 29 jenis ikan yang bisa dibudidayakan salah satunya Ikan arwana silver yang sudah berhasil dibudidayakan.

Konservasi

Beberapa jenis ikan perlu diberikan tindakan konservasi karena mengandung nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai budaya, nilai religi, nilai estetika, dan adanya ancaman kepunahan.

Agar ikan endemik bisa terus bertahan dan populasinya meningkat lagi, perlu dilaksanakan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. Prinsip konservasi, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut diatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Dalam melaksanakan konservasi sumber daya ikan, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Selain dalam UU, konservasi juga diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang di dalamnya diatur tentang pengelolaan konservasi atau habitat ikan.

Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem, Selain mengatur tentang konservasi, di dalam PP disebutkan juga aturan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Adapun, tujuan dilaksanakan konservasi jenis ikan tertentu, adalah:

- 1) Menjaga atau meningkatkan produksi;
- 2) Keseimbangan alam;
- 3) Perbaikan genetika/spesies;
- 4) Menggali manfaat potensial;
- 5) Turisme;
- 6) Pendidikan dan penelitian;
- 7) Estetika;
- 8) Endemik, etnik;
- 9) Kesehatan lingkungan;
- dan 10) Kelestarian keanekaragaman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari bahasan pada bab-bab tedahulu dan hasil analisis strategi pelesatarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Provinsi Jambi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Sub Sektor Perikanan Mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen sebagai penyokong PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2014-2018.
2. Rata-rata RTUP Perikanan Laut sebanyak 95 persen telah menggunakan Kapal Motor.
3. Produksi perikanan Tangkap Laut Provinsi Jambi sebesar 45.982 ton atau 48,06 persen, produksi perikanan budidaya sebesar 42.536 ton atau 44,45 persen dan produksi perairan umum 7.168 ton atau 7,49 persen.
4. Produksi Perikanan Laut hanya didapat dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur senilai 23.86,4 ton, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 21.719 ton.
5. Rata-rata produksi perikanan darat budidaya, komoditi ikan Nila menempati nilai tertinggi yakni 19.053,43 ton, dari data tersebut, produksi perikanan budidaya ikan nila tertinggi dalam budidaya keramba dan kolam.
6. Produksi Perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata 25.493,9 ton dan Kabupaten Batanghari sebesar 10.191,9 ton untuk berbagai komoditi jenis ikan.
7. Perkembangan alat tangkap di perairan umum secara besar mengalami penurunan, yang terbesar terjadi pada Kota Jambi yakni turun sebesar 128,40 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan pada Kabupaten Kerinci sebesar 18,82 persen.
8. LQ produksi Perikanan pada jenis perairan laut nilai LQ tertinggi dan termasuk kedalam basis komoditi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 1,98 dan bertipologi potensial dan Tanjung Jabung Barat memiliki nilai 1,83 namun bertipoloagi Prima.
9. LQ Produksi Perairan Umum Berbasis pada 7 wilayah dan Kabupaten Merangin dengan LQ tertinggi 5,83.

10. LQ Perikanan Budidaya Berbasis pada 9 wilayah dan pada Kabupaten Batanghari dengan nilai LQ tertinggi 50,36.
11. LQ Perairan Darat Kolam berbasis pada 8 wilayah dengan Kabupaten merangin LQ 1,98 yang tertinggi, dan Perairan Darat Keramba tidak terdapat wilayah Basis, namun Kota Jambi memiliki nilai LQ tertinggi 0,70.
12. Hasil Analitical Hierarchy Process (AHP) didapat nilai CR = 0,046 dengan usaha perikanan alternatif pengembangan sebagai berikut ; Peringkat Pertama Perikanan Budidaya, diikuti Perikanan Laut dan Perairan Umum.
13. Hasil Analisa SWOT Strategi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Provinsi Jambi menggunakan Strategi **Strenghts-Threats (ST)**, dengan nilai 4,60 dan berada pada strategi kuadran II atau Diferensiasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis strategi pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat maka beberapa hal yang disarankan dalam strategi ini; perlunya fasilitasi Wadah dan Perairan Budidaya, meningkatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum, pengembangan pakan lokal.

Perlu dilaksanakan kesinmabungan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Sedangkan untuk saran analisis selanjutnya diharapkan dapat dilakukan studi kemampuan dan potensi usaha industry pengolahan hasil produk perikanan swakelola kelompok masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan. Kementrian PPN/Bappenas.Jakarta.
- , 2015. Provinsi Jambi Dalam Angka 2015., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1525. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2016. Provinsi Jambi Dalam Angka 2016., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.13.15. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2018. Provinsi Jambi Dalam Angka 2017., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1702. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018, No.ISSN : 2502-7492. No. Publikasi: 04210.1814. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta..
- ,2018. Satu Data Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. ISBN. 978-602-1278-25-3. Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- ,2018. Analisis Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Jambi 2018, No.ISBN : 978-602-0784-30-4. No. Publikasi: 15520.1907. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2019. Provinsi Jambi Dalam Angka 2019., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1702. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.

- ,2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi 2014-2018, No. Publikasi: 15550.1803. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- Hendayana,Rachmat.2003.Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Informatika Pertanian. Volume 12(Desember 2013)
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan I. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Marimin. 2004. "Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria majemuk" Grassindo Jakarta.
- Nugroho, S. 2004. Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan pembangunan Daerah. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 1(Nomor 1), 23-30.
- Rangkuti Freddy. 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saragih,Jef Rudiantho, 2015.Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi.Lokal Berbasis Pertanian.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Saaty, T.L (19966), "Decision Making with Dependence and Feedback: The Analitic Network Process", RWS Publication, Pittsburgh.
- Syamsunarno Mas, Sunarno.2016. Budidaya Ikan Air Tawar Ramah Lingkungan Untuk mendukung Keberlanjutan Penyediaan Ikan Bagi Masyarakat. Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan. Bandar Lampung. 2016.

Lampiran.1. PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Tahun 2014-2018

Sektor PDRB	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.967.924,10	43.793.238,60	51.441.787,20	56.355.834,30	57.452.771,00	10,91%
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	33.117.948,80	38.141.366,20	45.214.392,80	49.784.923,10	50.314.278,60	11,02%
a. Tanaman Pangan	3.602.657,30	3.911.979,40	4.494.061,20	4.373.894,50	4.622.407,10	6,43%
b. Tanaman Hortikultura	4.849.229,10	5.405.993,90	6.343.663,30	6.647.145,30	7.028.870,30	9,72%
c. Tanaman Perkebunan	22.482.722,90	26.339.116,00	31.624.661,90	35.844.745,00	35.459.108,90	12,06%
d. Peternakan	1.814.161,70	2.089.384,10	2.279.693,20	2.408.276,80	2.661.258,80	10,05%
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	369.177,80	394.892,80	472.313,20	510.861,50	542.633,50	10,11%
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.834.917,10	2.119.458,80	2.266.483,60	2.295.899,80	2.403.432,40	6,98%
3. Perikanan	3.015.058,20	3.532.413,60	3.960.910,80	4.275.011,40	4.735.060,00	11,95%

Lampiran 2. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Kabupaten/Kota	Tangkap			BudiDaya			Total		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
KERINCI	1.009,0	985,0	985,0	3.330,5	2.649,8	4.027,2	4.339,5	3.634,8	5.012,2
MERANGIN	946,3	897,0	897,0	1.339,7	1.239,2	1.412,8	2.286,0	2.136,2	2.309,8
SAROLANGUN	580,0	624,7	625,0	2.726,0	3.070,0	3.183,0	3.306,0	3.694,7	3.808,0
BATANGHARI	849,6	726,2	726,0	10.886,3	11.124,5	8.565,0	11.735,9	11.850,7	9.291,0
MUARO JAMBI	1.454,5	1.107,4	1.107,0	24.366,4	25.295,0	26.820,6	25.820,9	26.402,4	27.927,6
TANJUNG JABUNG TIMUR	23.813,4	23.959,8	23.960,0	222,3	229,1	1.542,2	24.035,7	24.188,9	25.502,2
TANJUNG JABUNG BARAT	23.189,1	21.503,0	21.645,0	1.725,9	1.633,1	400,4	24.915,0	23.136,1	22.045,4
TEBO	285,5	312,0	312,0	932,9	959,1	1.098,4	1.218,4	1.271,1	1.410,4
BUNGO	235,0	232,8	233,0	773,4	802,7	894,1	1.008,4	1.035,5	1.127,1
KOTA JAMBI	986,9	850,0	850,0	2.566,7	2.490,0	2.392,2	3.553,6	3.340,0	3.242,2
KOTA SUNGAI PENUH	136,8	109,8	110,0	248,1	201,9	64,7	384,9	311,7	174,7
PROVINSI JAMBI	53.486,1	51.307,7	51.450,0	49.118,0	49.694,4	50.400,6	102.604,1	101.002,1	101.850,6

Lampiran 3. Produksi Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010-2018 (Ton)

No	Komoditi	Produksi (Ton)								
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	Perikanan Laut	45.605	44.557	45.800	45.113	48.540	47.713	46.895	45.095	44.523
2	Perairan Umum	7.077	7.039	7.686	7.445	7.540	7.540	7.111	6.644	6.425
3	Budidaya	50.400	49.691	49.419	45.153	45.266	45.266	36.982	30.269	30.379
	Total Produksi	103.082	101.287	102.904,6	97.711	101.346	100.519	90.988	82.007	81.327

Lampiran.4. Perkembangan Jumlah Alat Tangkap Perairan Umum

Wilayah	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	rata-rata
KERINCI	569	569	2.058	2.301	2.301	1.560
MERANGIN	5.382	4.817	1.988	1.250	1.250	2.937
SAROLANGUN	2.066	2.194	2.698	1.984	1.984	2.185
BATANGHARI	1.033	912	694	169	623	686
MUARO JAMBI	1.204	1.761	3.440	2.164	2.498	2.213
TANJUNG JABUNG TIMUR	1.946	2.073	2.300	611	611	1.508
TANJUNG JABUNG BARAT	2.583	2.402	2.299	863	863	1.802
TEBO	2.085	2.017	2.321	1.729	1.729	1.976
BUNGO	2.359	2.507	4.429	2.743	2.743	2.956
KOTA JAMBI	9.732	9.422	2.232	1.229	1.586	4.840
KOTA SUNGAI PENUH	553	553	553	179	179	403
PROVINSI JAMBI	29.512	29.227	25.012	15.222	16.367	23.068

Lampiran .5. LQ Produksi Perairan dan Budidaya

Kabupaten - Kota	Location Quotient (LQ) Produksi Perairan			Location Quotient (LQ) Budidaya			
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya	Kolam	Keramba	Sawah	Tambak
KERINCI	-	3,880	1,603	1,075	0,310	-	-
MERANGIN	-	5,828	1,283	1,980	0,246	-	-
SAROLANGUN	-	2,728	1,818	1,385	-	-	-
BATANGHARI	-	0,681	2,180	0,795	0,590	-	-
MUARO JAMBI	-	0,812	2,149	1,032	0,349	-	-
TANJUNG JABUNG TIMUR	1,984	0,339	0,052	0,740	0,244	-	-
TANJUNG JABUNG BARAT	1,827	0,414	0,211	1,049	0,032	0,004	0,300
TEBO	-	3,471	1,688	1,164	0,221	-	-
BUNGO	-	2,949	1,785	1,285	0,101	-	-
KOTA JAMBI	-	2,894	1,800	0,683	0,702	-	-
KOTA SUNGAI PENUH	-	5,350	1,386	1,385	-	-	-

Lampiran 6. : Perikanan Budidaya



**Budidaya Keramba Jaring Apung(KJA) Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
di DAS Batanghari, Jambi**



Budidaya Ikan Kolam Terpal

..Lanjutan Perikanan Budidaya



Budidaya Ikan Kolam Tanah



Budidaya Ikan Kolam Semen/Beton

Lampiran 7. : Beberapa Jenis Ikan Budidaya Provinsi Jambi



Ikan Lele (*Clarias.sp*)



Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Lanjutan : Beberapa Jenis Ikan Budidaya Provinsi Jambi



Ikan Patin (*Pangasius.sp*)



Ikan Bawal Air Tawar (*Colossoma macropomum*)



Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*)

Lanjutan : Beberapa Jenis Ikan Budidaya Provinsi Jambi



Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)



Ikan Jelawat (*Leptobarbus hoevenii*)

Foto Kawasan Suaka Perikanan



Lubuk Larangan. Foto Erwin Dedi Rasyid



Danau Mahligai * Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi.



Danau Teluk Kenali terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi



Daerah Aliran Sungai (DAS) Lambur, Kabupaten Tanjabtim.



Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menebarkan benih ikan asli Danau Kerinci di Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Senin (11/2). (Foto: ANTARA FOTO)



Belida, salah satu ikan air tawar di Jambi, yang terancam.



Ikan hias botia (*Botia Macracanthai*), yang sempat menghilang di Jambi, saat ini sudah mulai pulih kembali. Balitbangdias Balitbang KP KKP berhasil membudidayakan dengan teknologi resirkulasi. Foto : pusluhkkp.go.id

Tabel Jenis ikan asli perairan umum Jambi dan peruntukannya (nama identifikasi berdasarkan pada Kottelat et al. (1993); Weber & de Beaufort (1936))

No.	Jenis ikan konsumsi	No.	Jenis ikan buas
	Ordo: Osteoglossiformes		Ordo Osteoglossiformes
	Famili: Notopteridae		Famili Osteoglossidae
1	Belido (<i>chitala lopis</i>)	1	Keleso (<i>Scleropages formosus</i>)***
2	Putak (<i>Notopterus notopterus</i>)		Ordo: Cypriniformes
	Ordo: Cypriniformes		Cyprinidae:
	Famili: Cyprinidae:		Genus: Cyclocheilichthys
	Genus: Cyclocheilichthys	2	Kopras (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>)
3	Wajang (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>)	3	Keperas (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>)
	Genus: Labiobarbus		Genus: Epalzeorhynchus
4	Lambak muncung (<i>Labiobarbus ocellatus</i>)	4	Susur batang (<i>Epalzeorhynchus kalopterus</i>)
5	Lambak pasir (<i>Labiobarbus festivus</i>)		Genus: Barbichthys
6	Lambak (<i>Labiobarbus kuhlii</i>)	5	Mentulu/bentulu (<i>Barbichthys laevis</i>)
	Genus: Leptobarbus		Genus: Crossocheilus
7	Kelemak (<i>Leptobarbus hoeveni</i>)	6	Susur batang putih (<i>Crossocheilus gnatopogon</i>)
	Genus: Neobarynotus	7	Susur batang putih (<i>Crossocheilus nigrioba</i>)
8	Kapas-kapas (<i>Neobarynotus microlepis</i>)		Genus: Hampala
	Genus: Neolissochilus	8	Sebarau lalat (<i>Hampala ampalng</i>)
9	Si mancung (<i>Neolissochilus sumtranus</i>)		Genus: Labeo
	Genus: Macrochirichthys	9	Si hitam (<i>Labeo M chrysopekadion</i>)
10	Parang (<i>Macrochirichthys macrochirus</i>)		Genus: Chela
	Genus: Mystacoleucus	10	Seluang terbang (<i>Chela laubuca</i>)
11	Masai (<i>Mystacoleucus padangensis</i>)		Genus: Luciosoma
	Genus: Osteochilus	11	Jajuo (<i>Luciosoma trinema</i>)
12	Aro (<i>Osteochilus bornensi</i>)	12	Johar (<i>L. setigerum</i>)
13	Aro merah mato (<i>Osteochilus melanopleura</i>)		Genus: Rasbora
14	Aro nasi (<i>Osteochilus schlegeli</i>)	13	Sebarau hutan (<i>Rasbora kalochroma</i>)
15	Medik (<i>Osteochilus enneaporos</i>)	14	Srigunting (<i>R. candimaculata</i>)
16	Palau (<i>Osteochilus haseltii</i>)	15	Seluang segitiga (<i>R. heteromorpha</i>)
	Genus: Rasbora	16	Seluang ridik (<i>R. dorsiocellata</i>)
17	Teri (<i>Rasbora</i> sp.)	17	Seluang biasa (<i>R. dusonensis</i>)
18	Seluang (<i>Rasbora argyrotaenia</i>)		Genus: Puntius
	Genus: Rasborichthys	18	Strip enam/kadis (<i>Puntius johorensis</i>)
19	Teri (<i>Rasborichthys helfrichi</i>)	19	Strip lima (<i>Puntius pentazona</i>)
	Genus: Barbodes	20	Selung maram (<i>P. eugrammus</i>)
20	Lampam/kepiat (<i>Barbodes schwanenfeldii</i>)	21	Lang sumatera (<i>Puntius rhomboocellatus</i>)
	Genus: Puntioplites		Genus: Puntioplites
21	Bangalan (<i>Puntioplites Bulu</i>)	22	Srepang (<i>Puntioplites waandersi</i>)
	Genus: Thynnichthys		Genus: Balantiocheilos
22	Ringo (<i>Thynnichthys thynnoides</i>)	23	Ridiangus (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>)***
23	Lambak pipih (<i>Thynnichthys polylepis</i>)		Ordo: Cypriniformes
	Genus: Hampala		Famili: Cobitidae
23	Kebarau (<i>Hampala macrolepidota</i>)		Genus: Botia
	Genus: Hampala	24	Ikan merah/gejubang (<i>Botia macracanthus</i>)
24	Kebarau (<i>Hampala macrolepidota</i>)	25	Langli hijau (<i>B. hymenophysa</i>)
	Ordo: Cypriniformes		Genus: Acantopsis
	Famili: Cobitidae	26	Tali-tali (<i>Acanthopsis octoactinotus</i>)
	Ordo: Siluriformes	27	Tali-tali (<i>Acanthoptthalmus shefordi</i>) (Weber & de Beaufort, 1936)
25	Famili: Siluridae	28	Tali-tali (<i>Acanthoptthalmus agularis</i>) (Weber & de Beaufort, 1936)
	Genus: Belodontichthys		Ordo: Siluriformes
26	Sengarat (<i>Belodontichthys dinema</i>)		Famili: Siluridae
	Genus: Ompok		Genus: Kryptopterus
27	Belut tulang (<i>Ompok leiocantus</i>)	29	Lais hujan (<i>Kryptopterus Palembangensis</i>)
28	Lais tapa (<i>Ompok hypophthalmus</i>)	30	Lais tima (<i>Kryptopterus apogon</i>)
	Genus: Kryptopterus	31	Lais kaca (<i>Kryptopterus minor</i>)
29	Lais kuning (<i>Kryptopterus schilbeides</i>)		Ordo: Siluriformes
30	Lais tunggul (<i>Kryptopterus kryptopterus</i>)		Famili: Siluridae
31	Lais (<i>Kryptopterus limpok</i>)		Genus: Ceratoglanis
32	Lais (<i>Kryptopterus mononema</i>)	32	Lais hitam (<i>Ceratoglanis scleronema</i>)
33	Lais putih (<i>Kryptopterus hexapterus</i>)		Famili: Chacidae
	Genus: Hemisilurus	33	Caka-caka (<i>Chaca bankanensis</i>)
34	Belut tulang (<i>Hemisilurus heterorhynchus</i>)		Ordo: Siluriformes
35	Hidung budak (<i>H. moolenburghi</i>)		Famili: Bagridae
	Genus: Ceratoglanis		Genus: Bagrichthys
36	Lais hitam (<i>Ceratoglanis scleronema</i>)	34	Lalayang (<i>Bagrichthys hyselopterus</i>)
	Genus: Wallago		Genus: Mystus
37	Tapah (<i>Wallago leerii</i>)	35	Baung lilin (<i>Mystus macracanthus</i>)
38	Tapah (<i>W. attu</i>)		Genus: Leiocassis
	Famili: Clariidae	36	Baung kembang (<i>Leiocassis siamensis</i>)
	Genus: Clarias	37	Tampang duren (<i>Leiocassis leiocanthus</i>)
39	Lele pendek (<i>Clarias meladerma</i>)	38	Baung murai (<i>Leiocassis stenomus</i>)
40	Lele panjang (<i>C. nieuhofii</i>)		Genus: Bagroides
41	Lele (<i>Clarias batracus</i>)		

42	Limbat (<i>C. leiacanthus</i>)	39	Punti (<i>Bagroides melapterus</i>)
43	Limbat (<i>C. teijsmanni</i>)		Ordo: Cyprinodontiformes
	Famili: Schilbidae		Famili: Belontiidae
	Genus: Laides		Genus: Xenentodon
44	Riu (<i>Laides hexanema</i>)	40	Julung julung (<i>Xenentodon canciloides</i>)
	Genus: Pseudeutropius		Famili: Channidae
45	<i>Pseudeutropius brachyopterus</i>		Genus: Channa
46	<i>Pseudeutropius moolenburghae</i>	41	Serandang (<i>C. pleurophthalmus</i>)
	Ordo: Siluriformes		Ordo Ordo: Perciformes
	Famili: Pangasidae		Sub Ordo: Anabantoidei
	Genus: Pangasius		Famili: Belontiidae
47	Patin lubuk (<i>Pangasius nasutus</i>)		Genus: Betta
48	Juaro (<i>Pangasius polyuranodon</i>)	42	Tempalo (<i>Betta anabantoides</i>)
	Genus: Helicophagus	43	Tempalo (<i>Betta picta</i>)
49	Patin muncung (<i>Helicophagus</i>) <i>waandersi</i>	44	Tempalo (<i>Betta anabantoides</i>)
	Famili: Aridae:	45	Tempalo (<i>Betta taeniata</i>)
	Genus: Arius		Genus: Trichopsis
50	Dalum (<i>Artus argyropleuron</i>)	46	Cupang (<i>Trichopsis vittata</i>)
51	Gutgut (<i>A. Polystaphylodon</i>)		Genus: Sphaerichthys
	Famili: Bagridae	47	Coklat gurami (<i>Sphaerichthys osphromenoides</i>)
	Genus: Mystus		Genus: Trichogaster
52	Berengit (<i>Mystus nigriceps</i>)	48	Sepat leeri (<i>Trichogaster leeri</i>)
53	Lundu (<i>M. wolffii</i>)		Ordo: Perciformes
54	Baung (<i>M. Nemurus</i>)		Sub Ordo: Percoidei
55	Baung kuning (<i>M. planiceps</i>)		Famili: Datnioididae
56	Jakso/bekot (<i>M. wyckii</i>)	49	Elang (<i>Datnioides microlepis</i>)
	Genus: Bagroides		Famili: nandidae
57	Punti (<i>Bagroides melapterus</i>)	50	Tabun (<i>Nandus nebulosus</i>)
	Ordo: Synbranchiformes	51	Ikan daun (<i>N. nandus</i>) (Weber & de Beaufort)
	Famili: Synbranchidae		Famili: Toxotidae
58	Belut (<i>Monopterus albus</i>)	52	Sumpit (<i>Toxotes jaculator</i>)
	Ordo: Perciformes		Famili: Scatophagidae
	Sub Ordo: Polynemoidae	53	<i>Scatopaghus argus</i>
	Famili: Polynemidae		Ordo: Perciformes
	Genus: Polystonemus		Sub Ordo: Mastacembeloidei
59	Janggut/serai (<i>Polystonemus multifilis</i>)		Famili: Mastacembelidae
	Ordo: Perciformes		Genus: Mastacembelus
	Sub Ordo: Channoidei	54	Tilan merah (<i>Mastacembelus erythrotaenia</i>)
	Famili: Channidae		Genus: Macrognathus
	Genus: Channa	55	Tilan putih (<i>Macrognathus aculeatus</i>)
60	Uan (<i>Channa gachua</i>)		Ordo: Perciformes
61	Gabus (<i>Channa striatus</i>)		Sub Ordo: Gobioidaei
62	Bujuk (<i>C. lucius</i>)		Famili: Gobiidae
63	Toman (<i>C. micropeltes</i>)	56	Genus: Brachygobius
	Ordo: Perciformes		Tawon (<i>Brachygobius doriae</i>)
	Sub Ordo: Anabantoidei		Ordo: Pleuronectiformes
	Famili: Anabantidae		Famili: soleidae
64	Betok (<i>Anabas cuvier</i>)		
	Famili: Helostomatidae		
65	Tebakang (<i>Helostoma temminckii</i>)		
	Ordo: Perciformes		
	Sub Ordo: Anabantoidei		
	Famili: Osphronemidae		
66	Kalui (<i>Osphronemus goramy</i>)		
	Famili: Belontiidae		
	Genus: Belontia		
67	Selincih (<i>Belontia hasselti</i>)		
	Genus: Trichogaster		
68	Sepat jawa (<i>Trichogaster trichopterus</i>)		
69	Sepat siam (<i>Trichogaster pectoralis</i>)		
	Ordo: Perciformes		
	Sub Ordo: Percoidei		
	Famili: Chandidae		
	Genus: Parambassis		
70	Kaca-kaca (<i>Parambassis wolffii</i>)		
71	Kaca-kaca (<i>Parambassis punctulata</i>)		
	Famili: Pristolepididae		
72	Beterung (<i>Pristolepis fasciata</i>)		
73	Beterung (<i>P. grootii</i>)		
	Ordo: Perciformes		Famili: Eleotrididae
	Sub Ordo: Gobioidaei		Genus: Oxyeleotris
74	Betutu (<i>Oxyeleotris marmorata</i>)		
	Ordo: Pleuronectiformes		
	Famili: soleidae		
	Genus: Synaptura		
75	Lidah (<i>Synaptura panoides</i>)		

**Data Lubuk Larangan / suaka / Reservat Perikanan
Dalam Provinsi Jambi Tahun 2017**

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
A.	KOTA JAMBI 1. Reservat Danau Teluk kenali	Rt 02 Rw 02 Kel. Teluk Kenali Kec.Telanai Pura Kota Jambi	4	No 523 Tahun 1993	- Lambak, kapiat,mentulu, Gurami, Patin,baung ,botia,langli	Rumah jaga dan papan Merk	Reserevat/S uaka Perikanan
B.	KABUPATEN TEBO 1. Lubuk Teluk Kayu Putih	Desa Teluk Kayu Putih kecamatan VII Koto	1,85	SK Bupati Bungo Tebo : 294 Tahun 1997 tentang penetapan Lubuk Kayu Putih sebagai suaka perikanan (Reservat) serta Lubuk Teluk Inti Air sebelah Ulu dan Lubuk Teluk Luncuran nago sebelah ilir untuk Lubuk Larangan sebagai Zona penyangga di Desa teluk Kayu Putih Kecamatan pembantu VII Koto Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo	Patin, tapah, kelemak, baung,gurami,juaro, kapiat, botia, Arwana	Papan Merk dan Perahu bermotor	Reserevat/S uaka Perikanan
C.	TANJUNG JABUNG BARAT 1. Suaka Sungai Dualap 2. Suaka Kerang Darah	Desa Sungai Dualap Kec.Kuala Betara Desa Muara seberang Kec. Seberang Kota	51.3 10.000 m ² = 1 (HA) 300.00 0m ² = 30 (HA)	SK Bupati Tanjab Barat No. 493 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember 2001	Kakap, Kerang ,Gulama,duri, sembilang,Belanak,udang kepiting Kerang darah,Gulama,duri, sembilang,Belanak,udang kepiting	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/S uaka Perikanan Reserevat/S uaka Perikanan

	3. Pangkal Babu	Desa Tungkal 1 Kec. Tungkal ilir	-	- Perdes No. 07 Tahun 2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Perlindungan Laut Pangkal babu	ikan kakap,Udang, Kepiting	- Pos Jaga - Perlengkapan	
	4. Suaka Perikanan Umum Danau Jabung	Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	14,3 Ha	- SK Bupati Tanjab Barat No. 844 Tahun 2006	ikan toman, ikan gabus, ikan baung, kapiat, udang	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/Suaka Perikanan
	5. Suaka Perikanan Perairan umum sungai pengabuan Desa Lubuk kambing	Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat	5	- SK. Bupati Tanjab Barat No. 845 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006	ikan semah, belida, kapiat, toman, udang galah	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/Suaka Perikanan
	6. Sungai Pematang Lumut sebagai suaka Perikanan	Kec. Betara Kab. Tanjab Jabung Barat (Belakang Taman Arwana)	1	- SK. Bupati Tanjab Barat No. 494 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember 2011	ikan arwana, toman, belida, baung, Udang galah	Papan merk	Reserevat/Suaka Perikanan
D.	KABUPATEN SAROLANGUN		39				
	1. Lubuk saiyo Sakato	Desa Lubuk Bedorong ke. Limun	2.0	SK Desa No. 01 tahun 2002	Ikan batu, Baung, Baung akar, Barau, catur, Gabus, gurami, Juar, Julung, Kebatung,Kelemak, Kapiat, Keting, Lampam, Mas, Nila, Selimang, Seluang, Semah, Tilan, Udang kecil	Papan merek	

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	2. Lubuk Temalang	Desa Temalang Kec. Limun	1.5	SK Desa No. 01 Tahun 2003	Ikan Batu, Baung, Baung akar, Barau, catur, Gabus, gurami, Juar, Julung, Kebatung,Kelemak, Keplat, Keting,Lampam,Mas,Nila, Selimang, Seluang, Semah, Tilan, Udang kecil	Papan merek	
	3. Lubuk Batu Begajang	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juara, Julung, Kebatung, Keplat, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes,Tilan,Udang Kecil		
	4. Lubuk Gambir	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juara, Julung,Kebatung,Keplat,Keting,Lampam,Lepu,Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes,Tilan,Udang Kecil		
	5. Lubuk serengin	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar, Julung,Kebatung,Keplat,Keting,Lampam,Lepu,Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes,Tilan,Udang Kecil		

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
6.	Lubuk jantan	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar, Julung, Kebatung, Keplat, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes, Tilan, Udang Kecil	Pos jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan
7.	Reservat Teluk Mensilang	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.0	SK Bupati No. 502 Tahun 2008	Batu, Baung, Baung Daso, Barau, Baung Tikus, Belido, Buntal, Dalum, Gabus, Juaro, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lambak, Lampam, Langli, Lais, Lepu, Malis, Pari, Selimang, Seluang, Semah, Semuruk, Sengarat, Sihitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Udang galah, Udang Kecil	Pos Jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan
8.	Lubuk Durian Hijau	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.0	SK Bupati No.502 Tahun 2008	Semah, Baung, Belido, Buntal, Dalum, Gabus, Juaro, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lampam, Langli, Lepu, Malis, Pari, Selimang, Seluang, Sengarat, Tawes, Tilan, udang Galah, Udang Kecil	Pos jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasaan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	9. Lubuk Tepian Rantau	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.5	SK Bupati No. 502 Tahun 2008	Ikan Batu,Baung, Baung Daso, Barau,Baung Tikus,Belido,Buntal,Dalum,Gabus, Juar,Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat ,Keting,Klemak,Lambak,Lampam,L angli,Lepu,Malis,Pari,Selimang,Sel uang,Semah,Semuruk,Sengarat,T ali,Tanah,Tawes,Tilan,udang Galah,Udang Kecil		
	10. Lubuk Babasamo	Dusun Manggis Desa Napal Melintang	1.0	SK Desa No. 06 Tahun 2008	Baung,Barau,Catur,Gabus,Gurami, Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Ketin g,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Se mah,Semuruk,seluang,Tawes,Tila, Udang kecil		
	11. Lubuk Plompek Anjing	Desa Pulau Salak Baru Kec.Batang Asai	0.5	SK Desa No.01 Tahun 2008	Baung,Barau,Catur,Gabus,Gurami, Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Ketin g,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Se mah,Semuruk,seluang,Tawes,Tila n,Udang kecil		
	12. Lubuk Larangan	Desa Guruh Baru Kec. mandiangin	1.0	SK Desa No. 06 Tahun 2009	Baung,Barau,Gabus,Julung,Kebat ung,Keplat,Keting,Kepras,Lampam ,Langli,Palau,Pimping,Seluang,Tap ah,Toman,Udang Kecil	-Papan Merek	

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasaan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	13. Lubuk Napal Ampa	Desa Tanjung Kec. Bathin VIII	2.0	SK Desa No. 01 Tahun 2010	Baung, Baung Daso, Barau, Baung Tikus, Bejubang, Belido, Bawal, Buntal, Dalum, Gabus, Juar, Juaro, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lambak, Lampam, Langli, Lepu, Malis, Pari, Palau, Selimang, Seluang, Semah, Semuruk, Sengarat, Sihitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Toman, udang Galah, Udang Kecil	-Pos jaga -Papan Merek -Perahu Motor -Tanda Batas -Shalter	Suaka Perikanan
	14. Lubuk moenti	Desa Monti Kec. Limun	1.5	Perdes No.02/MT/Perdes/III/2001	Baung, Baung Daso, Barau, Baung Tikus, Bejubang, Belido, Bawal, Buntal, Dalum, Gabus, Juar, Juaro, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lambak, Lampam, Langli, Lepu, Malis, Pari, Palau, Selimang, Seluang, Semah, Semuruk, Sengarat, Sihitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Toman, udang Galah, Udang Kecil	Papan Merek	Lubuk Larangan
	15. Reservat Arwana Kutur	Desa Monti Kec. Limun	6.5	SK Bupati No. 81 Tahun 2011	Arwana, Baung, Barau, Betutu, Belido, Gabus, Juar, Julung, Lais, Gurami, Kepiat, Keting, Klemak, Lambak, Palau, Seluang, Semah, Tapah, Tawes, Tilan, Toman, Udang Kecil	-Pos jaga -Tanda Batas -Papan Merek -Perahu Motor	Reservat/Suaka Perikanan

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
16.	Lubuk Saung Hantu	Desa Simpang Narso	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2011	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,Seluang,Rawes,Tilan,Udang Kecil		
17.	Lubuk Nan Duo	Desa Muaro Pemuat	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2011	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,Seluang,Rawes,Tilan,Udang Kecil	-Papan Merek -Saung -Tanda Batas	
18.	Lubuk Rengas Tanggo Seliku	Desa Tanjung Gagak Kec.bathin VIII	2.7	Perdes No. 01/TjGgk/2011	Semah ,Baung, Daso,Barau, murai,Belido,Dalum,Gabus,Gurami, Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,Klemak,Lambak,Lampam,Langli,Lais, Lepu,Malis,Pari, Selimang,Seluang, ,Semuruk,Sihitam,Tali,Tawes,Tilan, Udang Galah.	Pos jaga, papan merk, balai pertemuan	Reservat/ Suaka Perikanan
19.	Lubuk Hijau Temalun	Dusun Mersip Ulu Desa Mersip Kec. Limun	0.6	Perdes No.14/01/148/pds/sk/2012	Baung,Catur,Gabus,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Klemak,Lampam,Lele,Main,Selimang,Semah,Seluang, Seluang,Barau,Tilan,Udang Kecil		

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	20. Lubuk Mantri Sati	Dusun Mersip Tengah Desa Mersip Kec.Limun	0.8	Perdes No.14/01/148/pds/sk/2012	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar, Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah, Semuruk, Seluang, Rawes, Tilan, Udang Kecil		
	21. Lubuk Durian Ampo	Desa Sungai abang Kec. Sarolangun	2.8	Perdes No.12/DSA/2012	Semah,Daso,Barau,,Baung Tikus,Bejubang,Belido,Buntak, Dalam,Gabus,Idung Budak,Gurami,Juaro,Jenggot,Julung,Lais,Lambak,Langli,Kepiat,Kepras, Keting,Klemak,Lepu,Malis,Pari, Palau,Seluang, Seburuk, Senggarat, Sengikis, Sihitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Toman, Udang Galah.	-Papan Merek	
	22. Lubuk Beringin	Desa Tambak Ratu Kec.Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juaro, Julung,Kepiat,Keting, Lampam,Lepu,Main,Selimang, Semah,Semuruk,Seluang,Rawes,Tilan,Udang Kecil	-Papan Merek	
	23. Lubuk Pauh	Desa Tambak Ratu Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Batu,Baung,Barau,Catur,Gabus, Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Selimang, Semah,Seburuk,Seluang,Rawes, Tilan,Udang Kecil		

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
24.	Lubuk Bungin	Desa Batin Pengambang Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Semah,Baung,Barau,Catur,Gabus, Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Seburuk,Seluang,Rawes,Tilan,		
25.	Lubuk Sisip	Desa Batin Pengambang Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Batu,Baung,Barau,Catur,Gabus, Juaro,Julung, Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,, Selimang,Semah,Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	-	
26.	Lubuk Gerinjing	Desa Tanjung Gagak Kecamatan Bathin VIII		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus,Toman Gurami, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga	
27.	Lubuk Potai	Desa lubuk Bedorong Kecamatan Limun		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus, Toman, Gurami, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga	
28.	Lubuk Siku Keluang Tengku Nan Rancak	Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin III		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus, Gurami,Julung, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga	

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
E.	KAB. MERANGIN		42.301				
	1. Batu ciri tanaman ciri	Desa Telentam Kec.tabir Barat	9000 m ²	Peraturan Desa	Semah, Sebarau , lampam, Tilan Gabus, Udang, seluang	Rumah Jaga, Papan Merek	Reservat/ Suaka Perikanan Lubuk larangan
	2. Lancah bemben	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	10400 m ²	Peraturan Desa	Lampam, Tilan , patin,semah	Papan Merek	
	3. Puh	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	13000 m ²	Peraturan Desa	Semah, lampam ,gabus, udang	Papan Merek	
	4. Pasong	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	9860 m ²	Peraturan Desa	Lampam, udang, tilan, baung	Papan Merek	
	5. Batu Cikalak	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	14500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	6. Langgeh	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	12000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	7. Kandang	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	13400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	8. Sei.Ampar	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	12500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	9. Gobah	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	50000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	10. Batu Lancang	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	8250 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	11. Ma. Kalung	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	1700 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	12. Pintung	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	3750 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	13. Cupak	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	2600 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	14. Miring	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	10400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	15. Mesjid	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Barat	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	16. Empelu	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Ulu	12000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	

17. Batang Kibul	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Ulu	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
18. Tepian Yakup	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	10800 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
19. Punti	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
20. Ma.ngaol	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	9750 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
21. Pesong Ngaol	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
22. Teluk wang Sakti	Desa biuku tanjung kec.bangko	6500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
23. Ujung ting Ma. Masurai	Desa dusun bangko kec.bangko	19500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	Desa p.baru kec.bangko	15000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
24. Pulau Baru	Desa salam buku kec.bangko barat	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
25. Titian Syai	Desa guguk kec. Bangko	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
26. Ujung Tanjung	Desa Ma.bantan kec. Ma. Siau	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
27. Muara Bantang	Desa B. tekurung kec.Ma. Siau	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
28. Badak Tekurung	Desa Sp 3 Ma.Panco kec Ma.Siau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
29. Petai	Desa Sp 3 Ma.panco kec Ma.siau	3500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
30. Kecik	Desa durian Betakuk kec.Ma .Siau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
31. Lubuk Kangkung	Desa durian Betakuk kec.Ma .Siau	6500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
32. Batu Gajah	Desa durian Betakuk kec.Ma .Siau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
33. Limbat	Desa kapuk kec. Tabir ulu	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
34. Desa Kapuk	Desa pulau Aro kec. Tabir ulu	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
35. Muara Kelat					

	36. Jernih	Desa jernih kec.tabir ulu	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	37. Rantau Deras	Desa rantau deras kec. Tabir ulu	10000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	38. Banter	Desa Rantau Bidaro kec. Tabir ulu	2000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	39. Sp. Tiga	Desa Ma. Siau kec. Tabir Ulu	7400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	40. Muara Kukun	Desa Sekancing Kec. Tian Pumpung	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	41. Mampun	Desa Mampung Kec. Tabir	7000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	42. Papit	Desa Papit Kec. Pamenang	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	43. Sebulan	Desa mampun Kec.Tabir	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	44. Kendo	Desa T.Segagah Kec.Sei .Manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	45. Enau	Desa T.Segagah Kec.Sei .Manau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	46. Baru	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	47. Panjang	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	2000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	48. Janino	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	1500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	49. Duwat	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	50. Kam	Desa Serengat Kec. Sei Manau	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	51. Malun	Desa Serengat Kec. Sei Manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	52. Kemang	Desa Serengat Kec. Sei Manau	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	53. Tutung	Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau	1500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
	54. Genting	Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	
		Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek	

55. Penyok	Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
56. Tempat	Desa Pangkal Jambu kec.	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
57. Lubuk nggen	Pangkalan Jambu Desa Bukit Parentak Kec.	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
58. Bukit	Pangkalan Jambu Desa Rantau Ngaro Kec. Tabir Ulu	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
59. Panjang	Desa Medan Baru Kec. Tambang Baru	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
60. Meden	Desa Titian Teras Kec.Batang Masumai	3500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
61. Lubuk gaung	Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Barat	3700 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
62. Pulau Rengas	Desa Sekancing Kec.Tian Pumpung	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
63. Sekancing					

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
F.	KABUPATEN BUNGO		2.27				
	1. Macang	Dusun Tanjung Agung Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa			
	2. Tebat Lamo	Dusun Tebat Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa			
	3. Pusat Jalo	Dusun Baru Pasar Jalo Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa			
	4. Pandan Berduri	Dusun Tebing Tinggi Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa			
	5. Lubuk Manik	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan	0.45 Ha	SK Bupati Bungo No.53/Disnakkan tahun 2013		Rumah jaga, papan merk	Reservat/Suaka Perikanan
	6. Tapian Raden	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa			
	7. Lubuk Dusun Lamo	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa			Sudah restocking 2008
	8. Lubuk Silimak	Kampung Baru Sipin Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa			
	9. Lubuk Tapian Rantau Duku	Rantau Duku Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	10. Lubuk Rantau Pendung	Rantau Duku Kec. Rantau Duku		Peraturan Desa			Sudah Restocking 2008
	11. Lubuk Duyung	Muara Buat Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	12. Lubuk Panjang	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	13. Lubuk Ukuk (Apung)	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	14. Lubuk Pimping	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	15. Labuk Baru	Timbulasi Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	16. Lubuk Tinggi	Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	17. Lubuk Taming	Maringeh Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	18. Lubuk Harapan Baru ilir	Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			
	19. Lubuk Gedang Ulu Mudik	Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	20. Lubuk Sunsang			Peraturan Desa	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang		
	21. Lubuk Paku			Peraturan Desa	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang		
	22. Lubuk Jantan		1,4 Ha	SK Bupati No.56/Disnakkam tahun 2013	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang	Rumah jaga, papan merk	Reservat /sudah Restocking 2010
	23. Lubuk Sekampil			Peraturan Desa			
	24. Tanjung Menanti			Peraturan Desa			
	25. Lubuk Beringin			Peraturan Desa		Pos Jaga, Papan Merk	
	26. Lubuk Belukar Panjang			Peraturan Desa			
	27. Lubuk Panjang			Peraturan Desa			
	28. Lubuk Tebat			Peraturan Desa			
	29. Lubuk Batu Kerbau			Peraturan Desa			
	30. Lubuk Gandeng Duo			Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	31. Lubuk Bukit Telago	Senamat Kec.Pelepat	2.400m ²	Peraturan Desa	Semah, Baung, Patin, lampam , udang galah, juaro, toman , seluang, tilan, Tapah	Pos Jaga,Perahu, papan merk	Reservat/ Sudah Restocking 2010
	32. Lubuk Pauh	Senamat Kec.Pelepat		Peraturan Desa			
	33. Lubuk Piri	Senamat Kec.Pelepat		Peraturan Desa			
	34. Lubuk sahu	Senamat Kec.Pelepat		Peraturan Desa			
	35. Lubuk Baru	Senamat Kec.Pelepat		Peraturan Desa			
	36. Lubuk Tanjung Alai	Senamat Kec.Pelepat		Peraturan Desa			
	37. Lubuk Rantau Asam	Rantau Asam Kec. Pelepat		Peraturan Desa			
	38. Lubuk temiang	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	39. Lubuk Kayo Kundur	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	40. Lubuk Raden	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	41. Lubuk Tenyoayan	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	42. Lubuk Pikir	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	43. Lubuk gong Bituah	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		Peraturan Desa			
	44. Lubuk Kasai	Dusun Danau Kec. Pelepat Ilir		SK Bupati No.54/Disnakkah tahun 2013			
		Koto Jayo Kec. Pelepat Ilir					
		Koto Jayo Kec. Pelepat Ilir					

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	45. Lubuk Danau Baru	Babeko Kec. Bathin II Babeko	0.18Ha	Peraturan Desa	Baung, Patin, lampam , semah, udang galah, juaro, toman , seluang, tilan, Tapah		Reservat/ Sudah Restocking 2010
	46. Lubuk Danau Ketapang	Sepunggur Kec. Bathin II Babeko		Peraturan Desa			
	47. Lubuk Keramat	Sepunggur Kec. Bathin II Babeko		SK Bupati No.55/Disnakkan Tahun 2013			
	48. Lubuk Mat Biban	Teluk Pandan Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa			
	49. Lubuk Tumaun	Ds.Baru teluk Panjang Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa			
	50. Lubuk Condong			Peraturan Desa			
	51. Lubuk Tapah	Air Gemuruh Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa			
	52. Lubuk tenam	Air Gemuruh Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa			
	53. Lubuk Jawi	Purwo Bhakti Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa			
		Dusun Baru Kec. Bathin III Sungai Binjai	Peraturan Desa				

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	54. Lubuk dalam Inti	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa			
	55. Lubuk Penyangga Hulu	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa			
	56. Lubuk penyangga Hilir	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa			
	57. Lubuk Renah	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	58. Lubuk Sungai Besar	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	59. Lubuk J. Terban	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	60. Lubuk Pemunyin Muda	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	61. Lubuk Tebo Pandak	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	62. Lubuk Macan Penyangga	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	63. Lubuk Terian Terang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	64. Lubuk Gajah Mino	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	65. L.Dsn Psr.Lbr Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	66. Lubuk Tebo Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	67. Lubuk Duo Limbur	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	68. Lubuk Rantau Tipu	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	69. Lubuk Beringin	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	70. Lubuk Bacang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	71. Lubuk Tapian Tanantai	Baru Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	72. Lubuk Napal	Baru Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	73. Lubuk Babaso	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	74. Lubuk Pandir	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	75. Lubuk Kapuk	Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa			Reservat

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	76. Lubuk Tanah Terban	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	77. Lubuk Panjang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	78. Lubuk Belimbing	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	79. Lubuk Cangkul Jaya	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	80. Lubuk Tapian Lamo	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	81. Lubuk Surup	Sei Surup/ Tebing Tinggi Kec. Tanah Tumbuh		Peraturan Desa			
	82. Lubuk Panjang	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	83. Lubuk Panti Kayu	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	84. Lubuk Sungai Asam	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	85. Lubuk Pangku	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			Reservat /Suaka Perikanan
	86. Lubuk Kumbang Sasi	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	87. Lubuk Pangku	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	88. Lubuk Lesung	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	89. Lubuk Manyang Tebal	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	90. Lubuk Neleh	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	91. Lubuk Bedero	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	92. Lubuk Surup	Sungai surup / Tebing tinggi		Peraturan Desa			

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
G.	TANJUNG JABUNG TIMUR		200				
	1. Reservat (sinoran) Kuala Sungai Sinoran	Kecamatan Mendahara ilir Kab. Tanjung Jabung Tmur	100 Ha	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nonor 146 Tahun 2001	-Kepiting Bakau		Reservat/Sua ka Perikanan
	2. Reservat (Lambur Lestari Kuala Sungai Lambur Luar)	Kecamatan Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur	100 Ha	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 145 Tahun 2001	-Kerang Dara		Reservat/Sua ka Perikanan
	3. Sumbun	Sumbun Kel. Tanjung Solok Kab. Tanjab Tmur					
	4. Alang-Alang	Desa Alang-alang Kab. Tanjab Timur					

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
H.	KABUPATEN BATANGHARI 1. Danau Embat	Desa Danau Embat Kab. Batanghari			Berlido, toman,gabus, kapiat	Pos Jaga, Papan Merk	Reservat/Sua ka Perikanan
I.	KABUPATEN MUARO JAMBI 1. Danau Mahligai 2. Danau Arang-Arang	Desa Danau Lamo Kab. Muaro Jambi Desa Arang-Arang Kab.Muaro Jambi			Toman,kapiat,Patin Serandang,Toman, gabus,Tambakang	Papan Merk Pos Jaga, Papan Merk	Reservat/Sua ka Perikanan Reservat/Sua ka Perikanan
J.	KABUPATEN KERINCI 1. Lubuk Panjang 2. Lubuk Sahab 3. Talang Kemulun	Desa Pulau Pandan Kab. Kerinci Desa Pulau Sangkar Kec. Gunung payo Kab.Kerinci Desa Talang Kemulun Kab.Kerinci			Semah,Medik ,sebarau Semah,Medik ,sebarau	 Pos Jaga, Papan Merk Papan Merk	Reservat/Sua ka Perikanan Reservat/Sua ka Perikanan Reservat/Sua ka Perikanan